



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

INDEF

**PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA
KERJA DI KAWASAN EKONOMI
KHUSUS (KEK) SORONG**

**PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA
KERJA DI KAWASAN EKONOMI
KHUSUS SORONG**

**Kerjasama
Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan
dengan
Institute for Development of
Economics and Finance (INDEF)**

Jakarta, Desember 2023

SAMBUTAN

Tujuan utama pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan di suatu wilayah tertentu. Dengan merancang KEK, pemerintah bertujuan untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi yang diutamakan. Selain itu, KEK juga membutuhkan perencanaan strategis terkait kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Oleh karena itu, Buku proyeksi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus menjadi landasan strategis yang penting dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ketenagakerjaan.

Buku ini tidak hanya merinci kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang dinamika pasar kerja di masa mendatang. Dengan demikian, pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan dapat bersinergi untuk memastikan ketersediaan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar, merancang kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang efektif, mengidentifikasi potensi investasi, dan merancang program pelatihan yang relevan.

Peran perencanaan tenaga kerja dalam buku ini tak hanya melibatkan pemetaan kebutuhan skill, tetapi juga menyoroti pentingnya penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global.

Keberhasilan kawasan ekonomi khusus sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan dinamis tersebut. Kolaborasi antara stakeholder menjadi inti dari upaya ini. Kami menyadari bahwa kerjasama erat antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus. Hanya dengan bersama-sama, kita dapat merancang solusi yang holistik dan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti fenomena *mismatch* di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus, di mana terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan tuntutan pasar. Analisis mendalam dan rekomendasi praktis yang terdapat dalam buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi upaya mengatasi *mismatch* tersebut.

Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga Buku Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus bukan hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga katalisator perubahan positif dalam penguatan ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Jakarta, Desember 2023
Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan



Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto, M.Eng

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu bentuk percepatan pengembangan wilayah yang memadukan pertimbangan potensi daerah dengan investasi di bidang industri khususnya sarana dan prasarana yang memacu berkembangnya kegiatan ekonomi menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing. Guna mewujudkannya, membangun kawasan industri memerlukan prasyarat utama, diantaranya adalah aspek ketersediaan tenaga kerja di samping kebutuhan infrastruktur.

Salah satu kawasan ekonomi yang sedang dikembangkan di Indonesia bagian timur adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Kawasan ini terletak di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dan berada di jalur strategis lintas perdagangan perdagangan internasional Samudra Pacific dan Australia. Di triwulan III KEK Sorong mampu menyerap 100 tenaga kerja dan investasi Rp254 miliar.

Dokumen ini disusun untuk memberikan informasi kebutuhan tenaga kerja di dalam kawasan. Lebih lanjut, dokumen ini disusun untuk menganalisis dampak pembangunan KEK Sorong terhadap kesempatan kerja. Dokumen ini diakhiri dengan rekomendasi strategi penyiapan kebutuhan tenaga kerja di KEK Sorong.

Struktur 59,9 persen yang berkerja di Kabupaten Sorong adalah tamatan SMP ke bawah. Hal ini

menunjukkan Kabupaten Sorong perlu upaya besar untuk merubah struktur penduduk yang berkerja agar tenaga kerja dengan pendidikan menengah dan tinggi lebih banyak.

Berdasarkan hasil analisis dampak pembangunan KEK (yang diasumsikan dengan tingkat investasi) maka memberikan dampak terhadap tumbuhnya ekonomi di berbagai sektor. Hasilnya, sektor ekonomi lainnya yang akan terdampak tumbuh paling tinggi karena adanya pembangunan KEK Sorong adalah sektor pengelolaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang yaitu sebesar 0,26 persen, diikuti oleh sektor yang akan tumbuh diikuti oleh industri pengolahan sebesar 0,24 persen serta real estate sebesar 0,25 persen.

Pembangunan KEK Sorong akan mempengaruhi pekerjaan berdasarkan sektor. Serapan tenaga kerja meningkat seiring dengan pertumbuhan output. Sektor jasa keuangan dan asuransi paling banyak mempengaruhi kesempatan kerja, diikuti oleh sektor perusahaan, kesehatan, dan kegiatan sosial.

Hasil proyeksi permintaan tenaga kerja di KEK Sorong pada 2024–2028 menunjukkan peningkatan bertahap. Pada 2024, permintaan tenaga kerja diproyeksi sebesar 236 orang untuk skenario rendah dan 337 orang untuk skenario tinggi, dan pada 2028, permintaan tenaga kerja diproyeksi sebesar 2.696 orang untuk skenario rendah dan 4718 orang untuk skenario tinggi.

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, hasil permintaan tenaga kerja menyebutkan bahwa tenaga

kerja lulusan diploma, SMTA kejuruan, dan universitas diperkirakan memiliki permintaan tertinggi. Di 2024, permintaan untuk lulusan diploma 71 orang, SMTA kejuruan 54 orang, dan universitas 47 orang. Di 2028, permintaan untuk lulusan diploma 809 orang, SMTA kejuruan 620 orang, dan universitas 539 orang.

Dengan struktur tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan, KEK Sorong akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja tingkat menengah dan pendidikan tinggi. Ini terlihat dari realisasi permintaan tenaga kerja SMP ke bawah (SMTP ke bawah) di KEK Sorong hanya 12,2 persen. Ini menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus memiliki karakteristik pendidikan menengah dan tinggi lebih diperlukan.

Lebih lanjut, hasil proyeksi permintaan tenaga kerja di KEK Sorong ditinjau berdasarkan jabatan yang paling dibutuhkan adalah adalah pekerja pengolahan, kerajinan dan ybdi, teknisi dan asisten profesional, dan operator dan perakit mesin.

Sebagai penutup, rekomendasi untuk KEK sorong meliputi melakukan percepatan sosialisasi konsep dan perencanaan di seluruh level stakeholder, mengembangkan SKKNI sesuai kebutuhan KEK Sorong, perluasan infrastruktur pendukung di darat dan laut, mengembangkan kurikulum pelatihan yang link and match dengan dunia usaha, mempersiapkan dan mengusulkan BLK pendukung di Provinsi Papua Barat Daya, melakukan pelatihan di sektor prioritas, dan mendorong kemitraan

dan kolaborasi antara dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan.

PUSRENAKER

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat	5
1.4 Keluaran	5
1.5 Ruang Lingkup	6
1.6 Kerangka Pemikiran	7
BAB 2. STUDI PUSTAKA DAN METODE ANALISIS	9
2.1. Teori Pengembangan Kawasan Ekonomi ..	9
2.2. Tipologi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	17
BAB 3. PROFIL KETENAGAKERJAAN DAN INVESTASI DI KABUPATEN SORONG	26
4.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah ..	26

4.2. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong	28
BAB 4. PROFIL KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG.....	58
4.1. Gambaran Umum KEK.....	58
4.2. Realisasi dan Rencana Investasi di KEK ..	60
4.3. Realisasi dan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja KEK	61
BAB 5. DAMPAK PEMBANGUNAN DAN PROYEKSI KESEMPATAN KERJA DI KEK SORONG.....	63
5.1. Dampak KEK Sorong terhadap Perekonomian dan Perluasan Kesempatan Kerja	63
5.2. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di KEK Sorong	67
5.3. Tantangan Pemenuhan Tenaga Kerja di KEK Sorong	74
BAB VI. PENUTUP	79
6.1. Kesimpulan	79
6.2. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik SMK Menurut Jurusan di Kabupaten Sorong	48
Tabel 5. 1. Skenario Proyeksi Investasi pada KEK	69
Tabel 5. 2. Skenario Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di KEK Sorong (Asumsi Moderat).....	73
Tabel 5. 3. Tabel Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di KEK Sorong Berdasarkan Jabatan	74

PUSRENAKER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. PDRB Kabupaten Sorong (ADHB) Bedarcken Lapangan Usaha 2022	27
Gambar 3. 2. Perkembangan PUK Kabupaten Sorong 2017-2022	29
Gambar 3. 3. Komposisi PUK Kabupaten Sorong Berdasarkan Pendidikan Per 2017 dan 2022	30
Gambar 3. 4. PUK Berdasarkan Jenis Kelamin 2018-2022	31
Gambar 3. 5. PUK Berdasarkan Golongan Umur 2018-2022	32
Gambar 3. 6. Perkembangan TPAK Kabupaten Sorong 2017-2022 (%).....	33
Gambar 3. 7. Perkembangan TPAK dan Kabupaten Sorong Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2018-2022	34
Gambar 3. 8. TPAK Kabupaten Sorong Berdasarkan Golongan Umur 2018-2022	35
Gambar 3. 9. Perkembangan Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sorong 2017-2022	36
Gambar 3. 10. Perbandingan Penduduk Bekerja Kabupaten Sorong Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 dan 2022	37
Gambar 3. 11. Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Sorong	39

Gambar 3. 12. Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sorong Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Gambar 3. 13. Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sorong Berdasarkan Jabatan 2018-2022	41
Gambar 3. 14. Perkembangan Jumlah Pengangguran dan TPT Kabupaten Sorong 2017-2022	42
Gambar 3. 15. Perkembangan TPT Kabupaten Sorong Berdasarkan Golongan Umur 2018-2022	44
Gambar 3. 16. Perkembangan TPT Kabupaten Sorong Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2018-2022	45
Gambar 3. 17. Perkembangan TPT Kabupaten Sorong Berdasarkan Jenis Kelamin 2018-2022	46
Gambar 3. 18. Perkembangan Jumlah Orang Bekerja dan TKK Kabupaten Sorong 2017-2022	47
Gambar 3. 19. Realisasi PMDN di Kabupaten Sorong 2015-2022 (dalam juta Rupiah)	53
Gambar 3. 20. PMDN Per Sektor di Kabupaten Sorong 2022 (dalam juta Rupiah).....	54
Gambar 3. 20. Realisasi PMA di Kabupaten Sorong 2015-2022 (dalam ribu USD).....	56
Gambar 3. 20. PMA Per Sektor di Kabupaten Sorong 2022 (dalam ribu USD).....	56
Gambar 3. 20. PMA di Kabupaten Sorong Berdasarkan Asal Negeranya 2022 (dalam ribu USD)	57
Gambar 4. 1. Peta KEK Sorong	59

Gambar 5. 1. Dampak Pembangunan KEK Sorong terhadap Perubahan Output Sektoral	65
Gambar 5. 2. Dampak Pembangunan KEK Sorong Terhadap Perubahan Kesempatan Kerja Sektoral	67
Gambar 5. 3. Proyeksi Investasi KEK Sorong.....	70
Gambar 5. 4. Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di KEK Sorong.....	71

PUSRENAKER

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus disahkan dengan Undang Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pada Undang Undang tersebut disebutkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, melalui peningkatan penanaman modal dengan menyiapkan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan Ekonomi Khusus dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri,

pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.¹

Salah satu Kawasan Ekonomi Khusus yang sedang dikembangkan adalah KEK Sorong. Lokasi KEK Sorong berada di Kelurahan Arar, Kabupaten/Distrik Mayamuk, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dan berada di atas lahan seluas 523,7 Ha. Secara strategis KEK Sorong berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia. KEK ini memiliki kegiatan utama industri pengolahan nikel, pengolahan kelapa sawit, hasil hutan dan perkebunan (sagu), serta logistik. Menurut Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, KEK Sorong diproyeksikan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 15.024 orang.

Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun akses jalan utama beserta saluran drainase sepanjang 3,5 km dan jalan lingkungan sepanjang 6,5 km. Telah terbangun pula Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG), yakni PLTMG Waymon, PLTMG Arar, dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) PT PLN untuk memasok kebutuhan listrik di

¹ UU No.39 Tahun 2009

kawasan Sorong Raya, sehingga saat ini telah tersedia Daya Mampu sebesar 46 MW dengan cadangan sebesar 9 MW.

Untuk jangka pendek, air bersih untuk Pelabuhan Arar dan industri existing akan menggunakan sumur bor dengan kapasitas 5 liter/detik dan Penampung Air Hujan (PAH). Sementara, untuk jangka panjang akan dibangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menggunakan sumber air dari Sungai Klasafet (Klamono) dengan kapasitas 500 liter/detik.

Terkait dengan capaian KEK Sorong, menurut SEKDEKNAS KEK (2019) dalam Kemenparekraf (2021), KEK Sorong telah menyumbang Rp8.778,9 miliar bagi perekonomian nasional. Keberadaan KEK Sorong telah memberikan nilai tambah bagi komoditas atau hasil alam yang berada di wilayah Sorong dan sekitarnya. Sawit dan nikel serta masing-masing turunannya saat ini merupakan komoditas unggulan eksisting di KEK Sorong. Sementara itu, sagu menjadi komoditas pendukung di KEK Sorong. Pengembangan pariwisata juga menjadi kegiatan di KEK Sorong, misalnya pariwisata ramah lingkungan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Raja Ampat.

Dengan potensi KEK Sorong merupakan Kawasan Ekonomi Khusus pertama di tanah Papua, maka KEK ini perlu didukung oleh berbagai faktor yang menjadi penentu daya saing, salah satunya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja perlu memiliki keahlian dan keterampilan spesifik untuk mendukung kegiatan usaha di KEK ini. Oleh sebab itu dokumen ini disusun dalam rangka memproyeksi permintaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan investor di KEK Sorong. Sehingga KEK Sorong dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia bagian timur.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka tujuan dari penyusunan dokumen ini antara lain:

1. Menganalisis kondisi ketersediaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.
2. Menyusun proyeksi permintaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.
3. Memperkirakan dampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong terhadap perekonomian wilayah dan perluasan kesempatan kerja.

4. Menyusun strategi penyiapan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

1.3 Manfaat

Manfaat dari penyusunan dokumen ini adalah:

1. Mengetahui kondisi ketersediaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.
2. Mengetahui proyeksi permintaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.
3. dampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong terhadap perekonomian wilayah dan perluasan kesempatan kerja.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.

1.4 Keluaran

Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat menghasilkan output diantaranya:

1. Dokumen informasi terkini mengenai kondisi ketersediaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.
2. Dokumen proyeksi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
3. Informasi mengenai dampak Pembangunan KEK Sorong terhadap perekonomian wilayah dan Kesempatan Kerja.
4. Rumusan strategi penyiapan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah:

1. Analisis kondisi ketersediaan tenaga kerja dilakukan pada KEK Sorong
2. Analisis proyeksi tenaga kerja dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dalam lima tahun ke depan.
3. Analisis mengenai dampak Pembangunan KEK Sorong terhadap perekonomian wilayah dan Kesempatan Kerja.

4. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dilakukan di KEK Sorong.

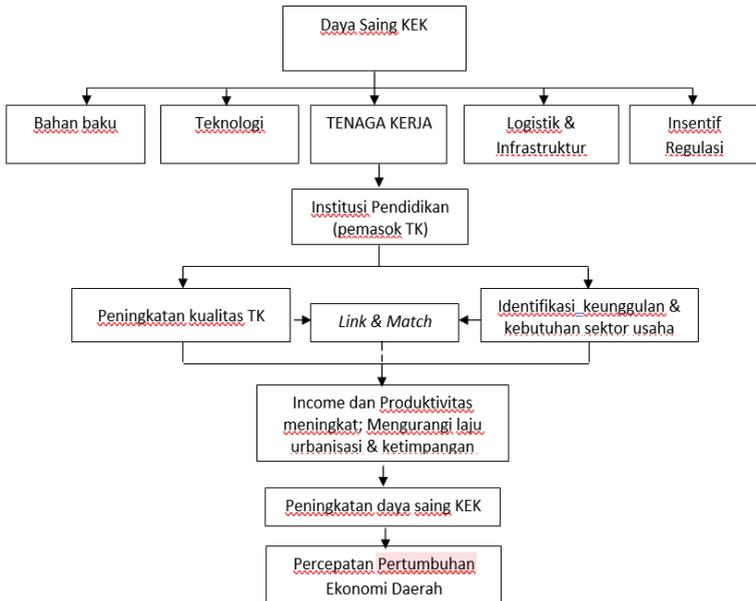
1.6 Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa faktor yang membentuk daya saing kawasan yaitu bahan baku, teknologi, tenaga kerja, logistik & infrastruktur, dan insentif & regulasi. Faktor tenaga kerja ini yang akan menjadi objek studi analisis.

Tenaga kerja yang terserap mempunyai latar pendidikan dan keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan dan lembaga ketenagakerjaan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Strategi yang kuat dibutuhkan untuk mempertemukan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih ini dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

Dengan data perkiraan penyerapan tenaga kerja di setiap KEK, dapat diperoleh gambaran keahlian yang dibutuhkan dan berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan (dengan masing-masing keahlian yang dibutuhkan). Setiap kebutuhan *skill* tenaga kerja mengacu pada kegiatan utama di dalam KEK tersebut. Kondisi saat ini terkait ketersediaan institusi pelatihan

untuk menunjang ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai.



Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran Kegiatan Proyeksi Tenaga Kerja Di Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber: INDEF, 2023

BAB 2. STUDI PUSTAKA DAN METODE ANALISIS

2.1. Teori Pengembangan Kawasan Ekonomi

Pengembangan kawasan merupakan bagian dari konsep pembangunan wilayah. Kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi, tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Mirzayaputra, 2021). Lebih lanjut Soedarso (2001, dalam Mirzaya, 2021) mengemukakan bahwa pengembangan kawasan merupakan salah satu upaya pembangunan wilayah atau daerah dan sumber daya (alam, manusia, buatan dan teknologi) secara optimal, efisien, dan efektif yang dilakukan dilakukan dengan cara menggerakkan kegiatan ekonomi dan mengakumulasikan berbagai kegiatan investasi tertentu yang dapat menjadi pemicu (trigger) bagi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, yang keseluruhannya diwadahi dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah maupun kawasan.²Pengembangan kawasan ini merupakan bagian dari konsep pembangunan wilayah dengan pendekatan klaster.

Pembangunan kawasan adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (*ecosystem*). Setiap sistem ini memiliki tujuannya masing-masing (Mirzayaputra, 2021).

Tujuan dari pengembangan kawasan adalah (Mirzayaputra, 2021): 1. Membangun masyarakat pedesaan, beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya; 2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat; 4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah; 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya

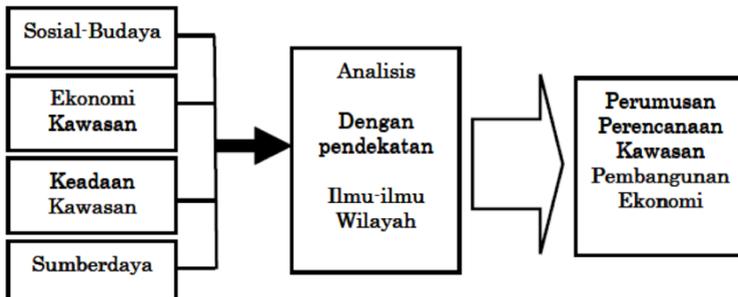
² Budiono Soedarso. 2001. Pengembangan Promosi dan Investasi Kawasan (Teritorial Marketing) Sebagai Wujud Pemanfaatan Ruang untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah. Jurnal Estat Vol. 3 No. 1

manusia dan konservasi sumberdaya alam demi kesinambungan pembangunan daerah; 6. Mendorong pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip dalam pengembangan kawasan adalah (Mirzayaputra, 2021): 1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan; 2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah; 3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing global; 4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan dan hortikultura, kelembagaan, dan budaya local; 5. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah; 6. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya para petaninya, dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak; dan 7. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Menurut Tom Edward MN (1999, dalam Mirzayaputra, 2021), kawasan adalah merupakan unit

geografis dengan batas-batas tertentu yang bagian-bagiannya saling tergantung satu sama lain secara fungsional ini dikembangkan dalam bentuk pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun hankam secara berkeeseimbangan dan berkesinambungan.



Gambar 2.1 Analisis Kawasan dengan Pendekatan Ilmu Wilayah

Sumber: Mirzayaputra, 2021

Menurut Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan dibagi menjadi:

- a. **Kawasan lindung** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- b. **Kawasan budi daya** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

- c. **Kawasan perdesaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- d. **Kawasan agropolitan** adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
- e. **Kawasan perkotaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- f. **Kawasan metropolitan** adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling

memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

- g. **Kawasan megapolitan** adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
- h. **Kawasan strategis nasional** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- i. **Kawasan strategis provinsi** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- j. **Kawasan strategis kabupaten/kota** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Lebih lanjut kawasan strategis dijelaskan pada Undang Undang tersebut, bahwa kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut:

1. Kepentingan pertahanan dan keamanan, yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.
2. Pertumbuhan ekonomi, yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

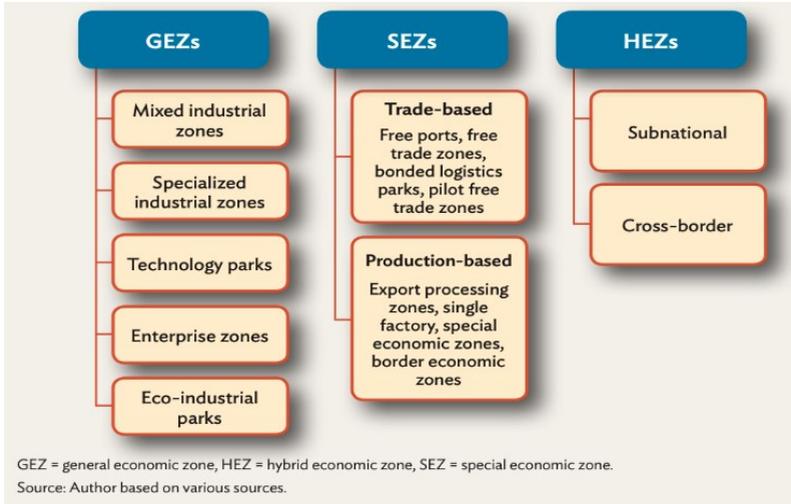
3. Sosial dan budaya, yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan.
4. Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
5. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.

Sementara itu nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi

penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2.2. Tipologi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Menurut UNCTAD (2019), Zona Ekonomi Khusus merupakan wilayah yang dibatasi secara geografis dimana pemerintah memfasilitasi kegiatan industri melalui insentif fiskal dan peraturan serta dukungan infrastruktur, yang banyak digunakan di sebagian besar negara berkembang dan negara maju. Meskipun kinerja banyak zona tetap di bawah ekspektasi, gagal menarik investasi yang signifikan atau menghasilkan dampak ekonomi di luar batasnya, zona baru terus dikembangkan, karena pemerintah semakin bersaing untuk aktivitas industri seluler internasional. Pembuat kebijakan tidak hanya menghadapi tantangan tradisional untuk membuat KEK berhasil, termasuk kebutuhan akan fokus strategis yang memadai, model peraturan dan tata kelola, dan alat promosi investasi, tetapi juga tantangan baru yang dibawa oleh keharusan pembangunan berkelanjutan, revolusi industri baru, dan perubahan pola ekonomi. produksi internasional.



Gambar 2.1 Kerangka Tipologi Kawasan

Sumber: Aggarwal, Aradhna – ADB (2022)

Sementara itu Aggarwal, Aradhna – ADB (2022) mengemukakan bahwa KEK adalah berbagai zona ekonomi yang berbeda dengan rezim hukum khusus dan lingkungan kelembagaan yang berbeda dari ekonomi lainnya. Mereka dibentuk untuk mengatasi defisit kelembagaan di negara-negara berkembang (Aggarwal 2010).

Trade-Based SEZs	
Free ports	<ul style="list-style-type: none"> • Free ports are a special kind of maritime port or airport where normal tax and customs rules do not apply.
Free trade zone (FTZ)	<ul style="list-style-type: none"> • An FTZ is a small, enclosed area carved out in or adjacent to ports or airports, offering warehousing, storage, and distribution facilities for trade, transshipment, and reexport operations, and located in the ports of entry or airports (UNCTAD 2019).
Bonded logistics parks (BLPs)	<ul style="list-style-type: none"> • BLPs are essentially a variant of free trade zones, offering a range of transport and logistics services to trade, including swift, customer-oriented just-in-time services and value-added logistics services to reduce inventory and raw material procurement costs.
Digital free trade zones (DFTZ)	<ul style="list-style-type: none"> • A DFTZ aims at providing physical and virtual space for SMEs to grow through cross-border e-commerce activities. It is supported by logistics centers set up in selected locations.
Production-Based SEZs	
Export processing zones (EPZs)	<ul style="list-style-type: none"> • A first-generation EPZ is a relatively small, geographically separated area within a country to attract export-oriented processing activity by offering favorable investment and trade conditions. It provides for importing goods to be used in the production of exports on a bonded, duty-free basis. • Second-generation EPZs are relatively larger and more sophisticated in terms of the composition of export processing activities, services, and facilities offered than the traditional ones.
Single factory EPZs	<ul style="list-style-type: none"> • EPZs may be promoted as a single firm or factory that is a designated enterprise with EPZ benefits. Mexico's maquilas and Mauritius's EPZs are well-known examples of single factory zones.
Special economic zones (SEZs)	<ul style="list-style-type: none"> • SEZs are mega open industrial towns spread over several square kilometers. The key features of SEZs are that they accommodate all activities, including tourism and retail sales, and permit people to reside on-site with an elaborate on-site social infrastructure. • Second-generation SEZs are more specialized and more complex than first-generation SEZs.
Special border economic zones (SBEZs)	<ul style="list-style-type: none"> • First introduced in Mexico (on US–Mexico border) in the early 1960s in the form of maquiladoras, border economic zones are set up to exploit comparative advantages of border areas that arise due to their climatic conditions, factor endowment, spatial proximity to foreign markets, and the relatively high potential for developing cross-border backward and forward linkages and regional cooperation. • Cross-border economic zones (CBEZs) are established by integrating border economic zones on both sides of the border to catalyze economic activity and promote regional cooperation. ADB supports the development of Hekou–Lao Cai and Pingxiang–Dong Dang CBEZs on the PRC–Viet Nam border.

ADB = Asian Development Bank, PRC = People's Republic of China, SMEs = small and medium-sized enterprises, UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development, US = United States.

Sources: Author based on the existing literature; and UNCTAD. 2019. *World Investment Report 2019: Special Economic Zones*. Geneva.

Gambar 2.2 Tipologi Fungsional Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber: Aggarwal, Aradhna – ADB (2022)

Biasanya, KEK didirikan untuk perusahaan berorientasi ekspor. Di negara berkembang, perusahaan tersebut pada umumnya berasal dari investasi asing. Melalui KEK maka ditawarkan berbagai kemudahan yang diatur dalam peraturan khusus untuk kegiatan ekspor dengan area pabean terpisah, manfaat bebas bea, prosedur yang disederhanakan, dan otoritas manajemennya sendiri (Akinci dan Crittle 2008). Namun KEK juga dapat menargetkan kegiatan substitusi impor atau investasi di industri prioritas. Di dunia sekarang ini, mereka telah menjadi alat penting bagi negara berkembang untuk terhubung ke rantai nilai global (GVC). Menurut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) (2019), 147 negara telah mendirikan hampir 5.400 KEK di dalam perbatasan mereka dan lebih dari 500 sedang dalam proses. Siring waktu, KEK telah berkembang menjadi berbagai bentuk, tergantung tujuannya.

Sebuah negara cenderung mengadopsi jenis KEK tertentu sesuai dengan tahap perkembangan ekonominya. Pendetang relatif baru untuk program KEK, seperti banyak ekonomi di Afrika, menggunakan KEK untuk memulai manufaktur, industrialisasi, dan ekspor. Banyak ekonomi yang lebih maju menggunakan zona untuk merangsang peningkatan industri. Dalam ekonomi transisi, zona yang berfokus pada teknologi adalah penting (UNCTAD, 2019).

Berikut ini adalah tahapan pengadopsian Kawasan Ekonomi Khusus.

	Zone policy objectives	Prevalent zone types
High-income economies	<ul style="list-style-type: none"> • Provide an efficient platform for complex cross-border supply chains • Focus on avoiding distortions in the economy 	<ul style="list-style-type: none"> • Logistics hubs free zones only (not industrial free zones) • Innovation and new industrial revolution objectives pursued through science parks without separate regulatory framework, or through incentives not linked to zones
Upper-middle-income economies	<ul style="list-style-type: none"> • Support transition to services economy • Attract new high-tech industries • Focus on upgrading innovation capabilities 	<ul style="list-style-type: none"> • Technology-based zones (e.g. R&D, high-tech, biotech) • Specialized zones aimed at high value added industries or value chain segments • Services zones (e.g. financial services)
Middle-income economies	<ul style="list-style-type: none"> • Support industrial upgrading • Promote GVC integration and upgrading • Focus on technology dissemination and spillovers 	<ul style="list-style-type: none"> • Specialized zones focused on GVC-intense industries (e.g. automotive, electronics) • Services zones (e.g. business process outsourcing, call centres)
Low-income economies	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulate industrial development and diversification • Offset weaknesses in investment climate • Implement or pilot business reforms in a limited area • Concentrate investment in infrastructure in a limited area • Focus on direct employment and export benefits 	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-activity zones • Resource-based zones aimed at attracting processing industries

Gambar 2.3 Tahapan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber: UNCTAD, 2019

Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah: rempah-rempah, kayu, beras, tembaga, timah, emas, kopi, teh, kakao, tembakau, karet, dan sejak 1883—minyak mineral. Pada masa kemerdekaan, perekonomian sangat bergantung pada perdagangan komoditas. Pada tahun 1949, pemerintah memulai industrialisasi sebagai mesin pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi berevolusi dengan rezim politik dan krisis ekonomi dan secara luas dapat diklasifikasikan menjadi tiga fase berbeda: 1949-1966,

1967–1999, dan 2005–selanjutnya. Setiap fase dikaitkan dengan perubahan evolusioner di zona ekonomi (Aggarwal, Aradhna - ADB, 2022).

2.3. Metode Penyusunan Proyeksi dan Analisis Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Perekonomian Wilayah

Dokumen proyeksi permintaan tenaga kerja disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan analisis serta beberapa sumber data. Jenis data yang akan digunakan dalam kajian ini meliputi data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DENAS KEK), Kementerian Ketenagakerjaan, *International Labor Organization*, Dinas atau OPD terkait serta berbagai sumber lainnya.

Pendekatan awal yang dilakukan dalam penyusunan dokumen ini antara lain adalah studi kepustakaan (*desk study*), hal ini berfungsi sebagai materi awal yang menjadi pengantar untuk dapat menganalisis perkembangan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di kawasan. Hal tersebut akan dilakukan secara mendalam terhadap berbagai dokumen, data sekunder, serta fenomena–fenomena yang terkait dengan perkembangan ketenagakerjaan di daerah dan di kawasan. *Desk study* juga merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran terlebih dahulu terhadap fenomena yang diamati. Selanjutnya untuk mendukung *desk study*

dilakukan kunjungan atau studi lapangan dan FGD sebagai cakupan analisis.

Field Study (Studi Lapangan) dilakukan untuk menggali informasi terbaru beserta data-data kuantitatif yang mutakhir dan informasi-informasi yang sulit diperoleh melalui kajian literatur. Studi lapangan akan dilakukan di Kawasan yang menjadi tujuan dalam analisis. Subjek yang menjadi pengamatan studi lapangan di antaranya adalah OPD atau Dinas terkait di daerah, pengelola kawasan serta representatif dari pelaku usaha.

Pada tahap selanjutnya, akan dilakukan pemaparan hasil desk study, studi lapangan dan hasil analisis kuantitatif dalam kegiatan FGD. FGD ini dilakukan untuk mengkonfirmasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya dan mendapatkan berbagai masukan stakeholders terkait yang dinilai kompeten.

Analisis Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja

Proyeksi permintaan tenaga kerja di KEK merupakan salah satu output yang akan disajikan dalam dokumen ini. Untuk memproyeksi tenaga kerja perlu didahului dengan melakukan proyeksi investasi di setiap KEK, karena investasi merupakan determinan penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan untuk melakukan proyeksi seluruhnya bersumber dari Dewan Nasional KEK, yaitu data target dan realisasi investasi serta penyerapan tenaga

kerja Proyeksi menggunakan 2 scenario, yakni moderat (low) dan optimis (high). Skenario didasari pada asumsi realisasi investasi selama 5 tahun ke depan.

Proyeksi tenaga kerja, terlebih dahulu diestimasi elastisitas pertumbuhan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan rasio antara penyerapan tenaga kerja terhadap nilai investasi. Setiap KEK memiliki rasio yang berbeda. Penentuan besaran asumsi (moderat & optimis) didasari pada capaian realisasi dan pertumbuhan investasi di masing-masing KEK. Karena capaian dan pertumbuhan investasi di setiap KEK berbeda maka penentuan besaran asumsi pada 5 tahun mendatang (2028) juga berbeda.

Analisis Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Perekonomian Wilayah

Selanjutnya penyusunan dokumen juga dianalisis dengan metode kuantitatif seperti analisis trend dan analisis ekonomi keseimbangan umum (CGE). Analisis ini dilakukan untuk menentukan hasil proyeksi dan mengestimasi dampak pembangunan kawasan terhadap kesempatan kerja di sektor-sektor yang terkait langsung maupun tidak langsung. Model CGE merupakan salah satu bentuk model multi sektoral yang sudah secara luas digunakan saat ini. Meluasnya penggunaan model CGE didukung oleh perkembangan teknologi komputasi dan memungkinkan untuk menganalisis perbedaan dampak

antar sektor produksi dan antar kelompok sosial ekonomi (Devarajan dan Robinson, 2002). Terkait dengan tujuan analisis pada dokumen ini, dilakukan beberapa justifikasi skenario dampak investasi pembangunan infrastruktur kawasan terhadap kesempatan kerja.

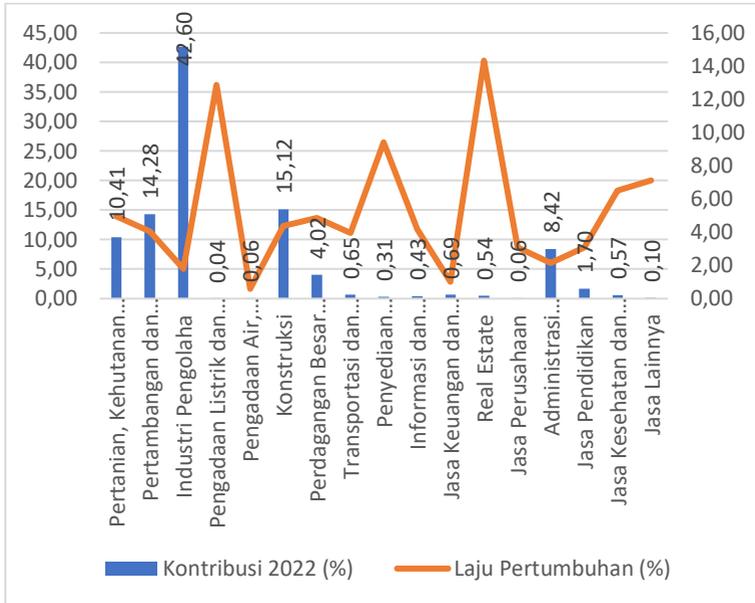
Model CGE yang digunakan adalah metode Ekonomi Keseimbangan Umum Regional atau *CGE IndoTERM* (The Enormous Regional Model). Model ini menggunakan data ekonomi Inter Region Input Output Indonesia untuk memperkirakan bagaimana sektor ekonomi bereaksi terhadap perubahan yang terjadi pada faktor-faktor eksternal seperti kebijakan, Pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor eksternal lain. Simulasi Pembangunan KEK akan dilihat dampaknya terhadap beberapa indikator pertumbuhan industri dan kesempatan kerja. Besaran simulasi yang digunakan adalah mempertimbangkan realisasi investasi di KEK dan pangsanya terhadap investasi di tingkat Propinsi.

BAB 3. PROFIL KETENAGAKERJAAN DAN INVESTASI DI KABUPATEN SORONG

4.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Secara administrasi, Kabupaten Sorong menjadi bagian dari Provinsi ke 38 yaitu Papua Barat Daya. Kabupaten ini memiliki lautan seluas 27.973 km² yang berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Manokwari. Secara geografis, Kabupaten sorong potensial untuk dijadikan pengembangan pariwisata alam dan bahari (BPK Republik Indonesia, 2023). Lebih lanjut, kekayaan alam akan minyak juga dilirik pelaku tambang minyak dunia.

Pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Sorong mencapai Rp11.54 triliun, meningkat 3,14 persen dibandingkan tahun 2021. Ditinjau dari struktur ekonominya, Industri pengolahan menjadi jenis lapangan usaha dengan kontribusi terbesar pertama terhadap PDRB tahun 2022, yakni mencapai 42,60 persen.



Gambar 3. 1. PDRB Kabupaten Sorong (ADHB) Bedarken Lapangan Usaha 2022

Sumber: BPS Kabupaten Sorong, 2023

Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 15,12 persen. Masifnya pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah dilakukan di Kabupaten Sorong menjadi pendorong tumbuhnya lapangan usaha konstruksi. Pembangunan di Kabupaten Sorong di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur listrik dan air, mengingat masih terbatasnya sumber daya listrik dan air di sana.

4.2. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong

Informasi mengenai profil dan kondisi ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Sorong diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai ketersediaan tenaga kerja dan menganalisis kesesuaiannya dengan kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh industri di Kabupaten Sorong, terkhusus pada KEK Sorong.

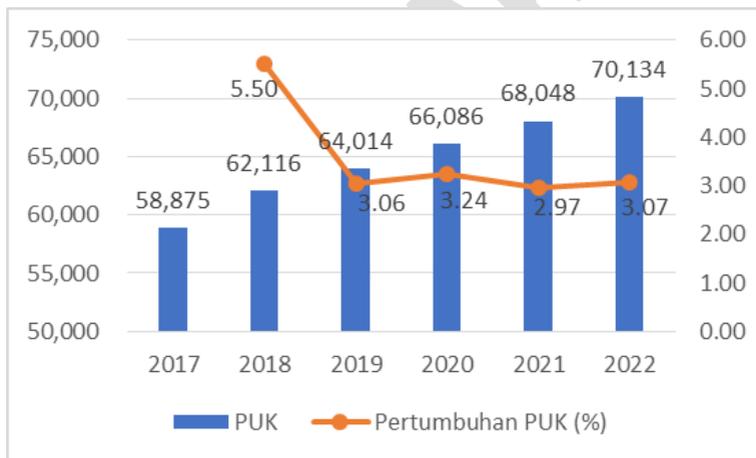
4.2.1. Penduduk Usia Kerja Kabupaten Sorong

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan penduduk yang berada di usia 15 tahun keatas, terdiri dari penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. PUK akan menunjukkan seberapa besar potensi SDM di suatu daerah. Semakin kecil jumlah PUK dibandingkan dengan total populasi penduduk, maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja semakin besar. Data PUK juga akan menjadi dasar untuk melihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat kesempatan kerja (TKK).

Data Sakernas menunjukkan jumlah PUK Kabupaten Sorong pada 2022 mencapai 70.134 penduduk. Komposisi PUK pada tahun 2022 terdiri dari 47.080 penduduk angkatan kerja dan 23.054 penduduk bukan angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelaminnya, komposisi PUK Kabupaten Sorong pada 2022 jumlah penduduk laki-lakinya tercatat lebih banyak dari pada perempuan, yakni

37.583 merupakan penduduk laki-laki dan 32.551 penduduk perempuan.

Ditinjau dari tren dalam 7 tahun terakhir, jumlah PUK di Kabupaten Sorong secara umum mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,57 persen per tahunnya. Tahun 2018 merupakan saat di mana PUK Kabupaten Sorong mengalami pertumbuhan tertinggi di 7 tahun terakhir, yakni 5,50 persen. Sementara itu pertumbuhan terendah terjadi pada 2021 di angka 2,97 persen.

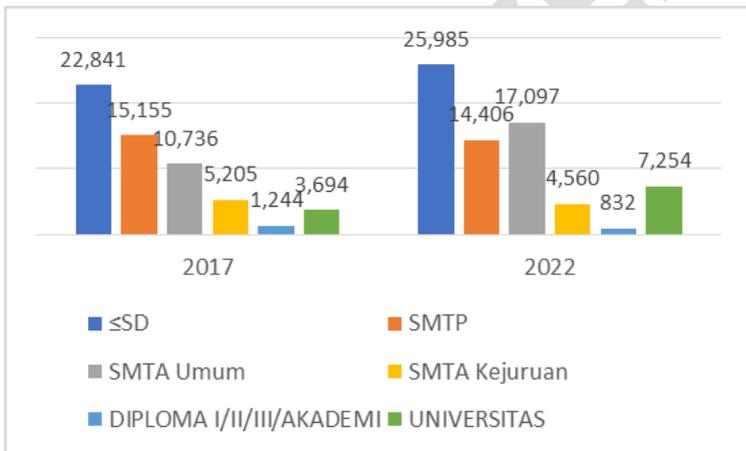


**Gambar 3. 2. Perkembangan PUK Kabupaten Sorong
2017-2022**

Sumber: Sakernas, BPS (2022)

Ditinjau dari latar belakang pendidikannya, PUK Kabupaten Sorong didominasi penduduk berpendidikan

≤SD, bahkan terdapat peningkatan dari 2017 yang berjumlah 22.841 penduduk menjadi 25.985 penduduk di tahun 2022. Selain itu, jumlah PUK lulusan SMTP dan SMTA juga cukup signifikan, di mana masing-masing berjumlah di atas 10,000 penduduk. Terlepas dari hal tersebut, PUK berpendidikan universitas tampak meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun 2017.

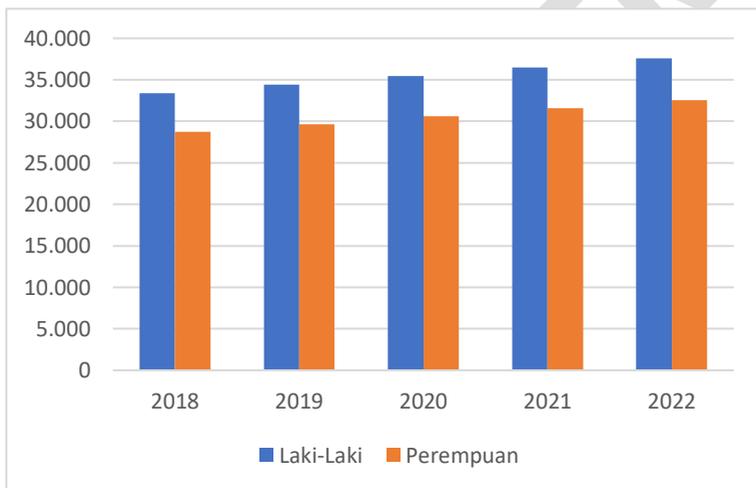


Gambar 3. 3. Komposisi PUK Kabupaten Sorong Berdasarkan Pendidikan Per 2017 dan 2022

Sumber: Sakernas, BPS (2022)

Lebih lanjut, penduduk usia kerja berdasarkan jenis kelaminnya didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan peningkatan yang tidak signifikan. Secara jumlah, baik laki-

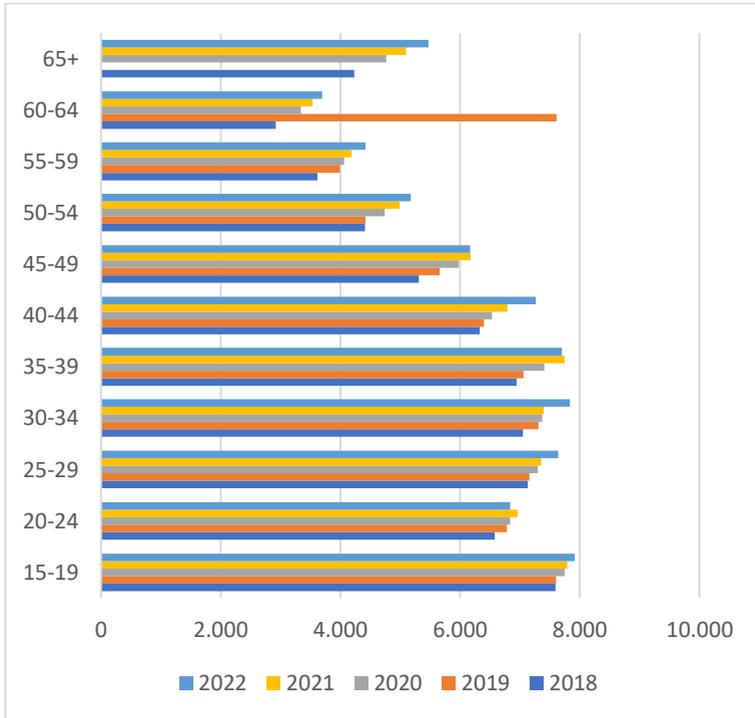
laki maupun perempuan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk laki-laki, jumlah yang awalnya sebanyak 33.373 di tahun 2018 menjadi 37.583 di tahun 2022 dengan jumlah peningkatan 4.210. Sementara itu, untuk perempuan, jumlah di tahun 2018 hanya 28.783 di 2018 dan meningkat hingga 32.551.



Gambar 3. 4. PUK Berdasarkan Jenis Kelamin 2018-2022

Sumber: Sakernas, BPS (2022)

Ditinjau berdasarkan golongan umur, presentase PUK dari tahun 2018-2022 didominasi oleh usia 15-19 tahun yang berkisar antara 7,5 sampai dengan 7,9. Secara umum, semua golongan umur PUK di Kabupaten Sorong memiliki tren meningkat.



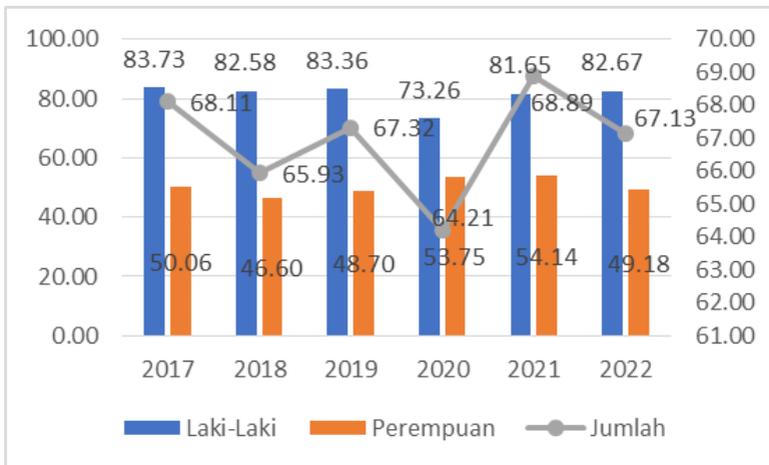
Gambar 3. 5. PUK Berdasarkan Golongan Umur 2018-2022

Sumber: Sakernas, BPS (2022)

4.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut BPS, konsep dan definisi dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin

tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (BPS, 2022).

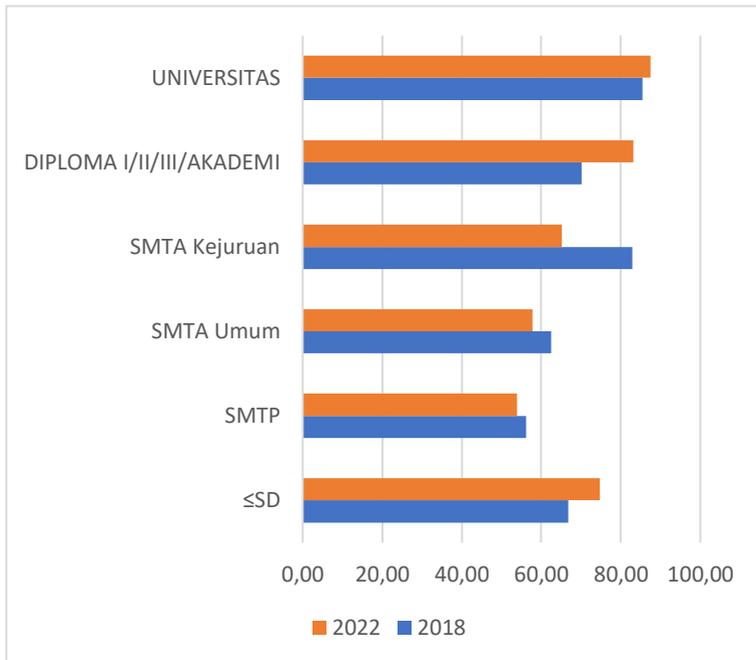


**Gambar 3. 6. Perkembangan TPAK Kabupaten Sorong
2017-2022 (%)**

Sumber: Sakernas, BPS (2022)

TPAK di Kabupaten Sorong tercatat berfluktuasi di sepanjang enam tahun terakhir. Pada 2022, TPAK berada di posisi 67,13% yang mana mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yang tercapai sebesar 68,89%. Ditinjau dari jenis kelaminnya, TPAK Kabupaten Sorong didominasi oleh laki-laki, dimana pada 2022 angkanya

mencapai 82,67% sementara TPAK perempuan hanya sebesar 49,18%.

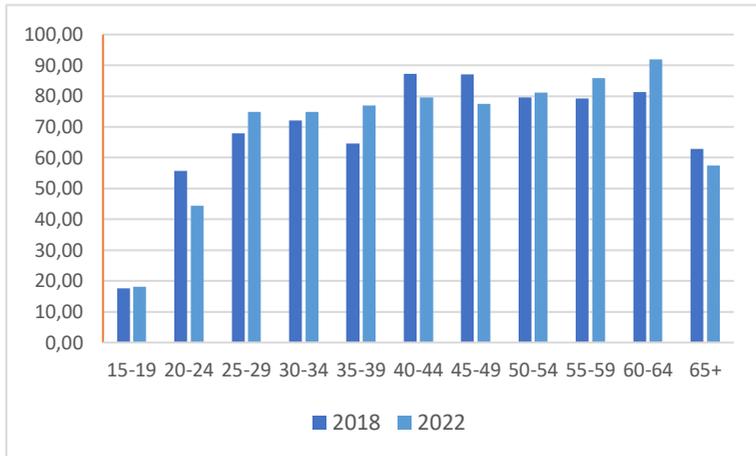


Gambar 3. 7. Perkembangan TPAK dan Kabupaten Sorong Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2018-2022

Sumber: Sakernas, BPS (2022)

Lebih lanjut, jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sorong secara umum mengalami kenaikan pada tingkat universitas, diploma, dan SD di tahun 2022. Namun demikian, untuk tingkat SMTA Kejuruan mengalami

penurunan yang signifikan yaitu dari angka 82,93 ke 65,22. Selanjutnya penurunan juga terdapat penurunan di SMTA umum dan SMTP namun tidak signifikan.



Gambar 3. 8. TPAK Kabupaten Sorong Berdasarkan Golongan Umur 2018-2022

Sumber: Sakernas BPS, 2022

Selanjutnya, TPAK yang mengindikasikan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK untuk di semua golongan umum memiliki tren meningkat kecuali di golongan umur 20-24 yang mengalami penurunan signifikan. Untuk TPAK dengan angka tertinggi di berkisar di golongan umur 40-44 dari 81,25 menjadi 91,88.

4.2.3. Penduduk yang Bekerja (PYB)

Penduduk yang bekerja adalah angkatan kerja yang secara aktif sedang bekerja. Secara umum, penduduk yang bekerja di Kabupaten Sorong mengalami fluktuasi di enam tahun terakhir. Pada periode 2022, penduduk yang bekerja mencapai 45.489 penduduk, tumbuh meningkat sebesar 0,40 persen dari tahun sebelumnya. Tercatat, penduduk yang bekerja sempat mengalami kontraksi atau tumbuh negatif (-1,89 persen) pada tahun 2020.

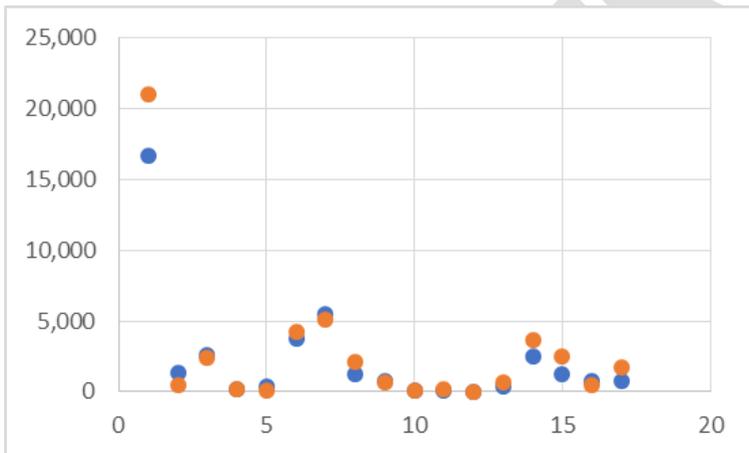


Gambar 3. 9. Perkembangan Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sorong 2017-2022

Sumber: Sakernas, BPS (2022)

Ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih terus menjadi

yang paling dominan dalam menyerap SDM di Kabupaten Sorong di 6 tahun terakhir. Pada 2022, tercatat penduduk yang bekerja di sektor tersebut mencapai 21.035 penduduk. Perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan menempati peringkat kedua dengan jumlah PYB sebesar 5.132 di periode yang sama.



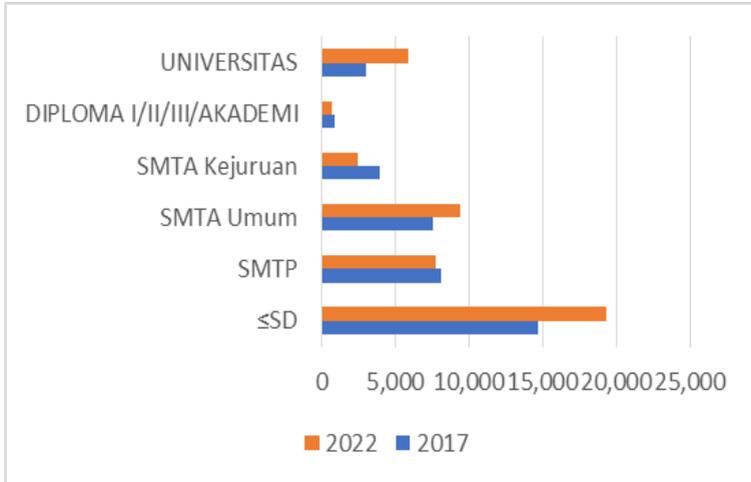
Gambar 3. 10. Perbandingan Penduduk Bekerja Kabupaten Sorong Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 dan 2022

Sumber: Sakernas, BPS (2022)

Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; 2. Pertambangan dan penggalian; 3. Industri pengolahan; 4. Listrik dan gas; 5. Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Bangunan; 6. Konstruksi; 7.

Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Keuangan, asuransi; 12. Real Estat; 13. jasa perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa lainnya.

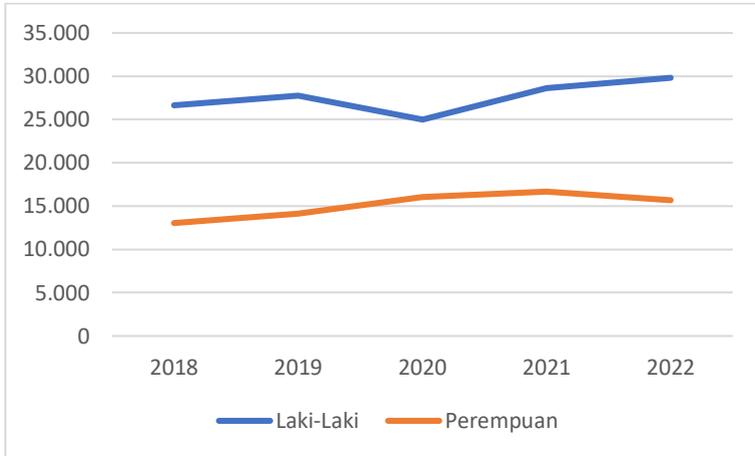
Sementara itu jika ditinjau dari pendidikannya, penduduk yang bekerja di Kabupaten Sorong di dominasi oleh lulusan SD, mencapai 19.337 penduduk. Tercatat bahwa penduduk yang bekerja lulusan SD juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 32,04 persen di banding tahun 2017 yang hanya 14.645 penduduk. Tingginya lulusan SD senada dengan tingginya penduduk yang bekerja di sektor pertanian yang notabene berpendidikan rendah.



Gambar 3. 11. Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Sorong

Sumber: SAKERNAS BPS 2022

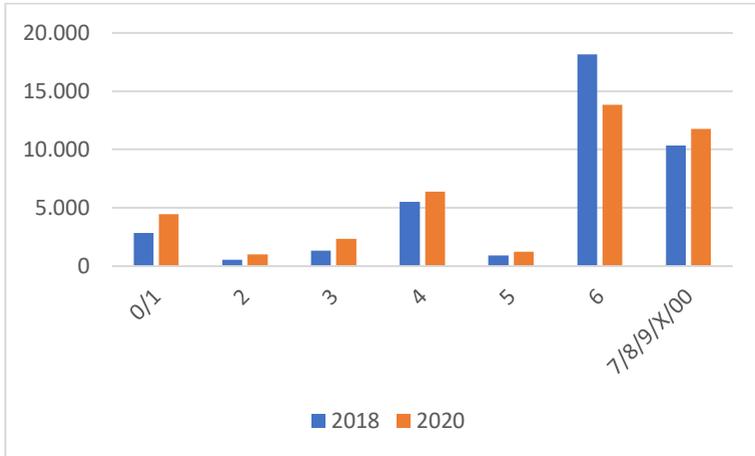
Lebih lanjut lagi, jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk bekerja dengan jenis kelamin dominan dibanding jenis kelamin perempuan yang berkisar di atas angka 24.992. Sementara itu, penduduk bekerja jenis kelamin perempuan memiliki tren meningkat sampai 2021 dengan jumlah 16.673 dan menurun di 2021 sebesar 15.674.



Gambar 3. 12. Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sorong Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: SAKERNAS BPS 2022

Dilihat dari jenis jabatan yang diduduki penduduk yang bekerja di Kabupaten Sorong periode 2018-2022 didominasi oleh pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini sejalan dengan geografis Kabupaten Sorong yang kaya akan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanannya. Jabatan terbanyak selanjutnya adalah jabatan pekerja pengilangan, kerajinan, dan ybdi, operator dan perakitan mesin, dan pekerja kasar.



0 TNI/Polri; 1 Manajer; 2 Profesional; 3 Teknisi dan Asisten Profesional; 4 Tenaga Tata Usaha; 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan; 6 Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 7 Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan ybdi; 8 Operator dan Perakit Mesin; 9 Pekerja Kasar

Gambar 3. 13. Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sorong Berdasarkan Jabatan 2018-2022

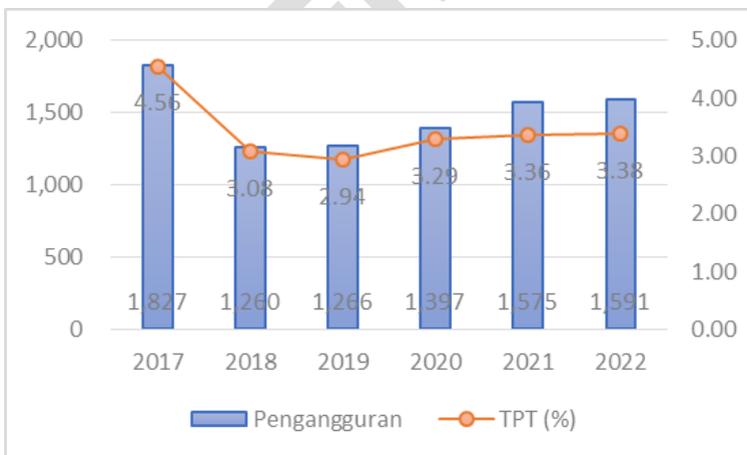
Sumber: SAKERNAS BPS 2022

4.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka dan TKK

BPS menyebutkan bahwa definisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran. Kategori pengangguran menurut BPS terdiri dari empat jenis, yaitu: i) penduduk yang aktif mencari pekerjaan; ii) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; iii)

penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan iv) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT mencerminkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT berarti semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. TPT dapat menjadi sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.

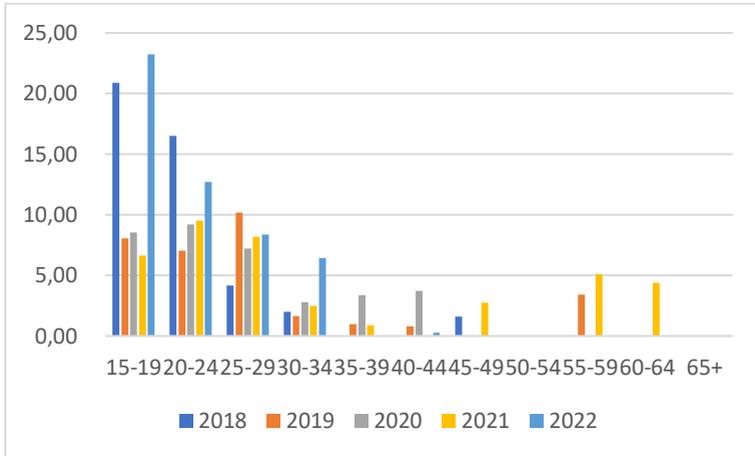


Gambar 3. 14. Perkembangan Jumlah Pengangguran dan TPT Kabupaten Sorong 2017-2022

Sumber: SAKERNAS BPS 2022

Pada kurun 6 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 hingga 2022, terlihat TPT Kabupaten Sorong mengalami fluktuasi. Pada 2022, TPT Kabupaten Sorong berada di level 3,38 persen. TPT tertinggi terjadi pada tahun 2017 di mana mencapai 4,56 persen. Sementara itu, 2019 menjadi tahun dengan TPT terendah di enam tahun terakhir, yakni sebesar 2,94 persen. Masuk ke tahun 2020 dimana covid-19 mulai memburuk, TPT kembali naik sebagaimana tampak pada gambar di atas.

Untuk TPT berdasarkan umur, golongan umur dengan rentang 15-19 memiliki jumlah yang paling tinggi di tahun 2018 dan di 2022. Hal ini bisa disebabkan karena usia tersebut merupakan usia sekolah yang masih belum aktif di dunia kerja. Sementara itu, untuk golongan umur 20-24 memiliki tren yang meningkat di angka 10.



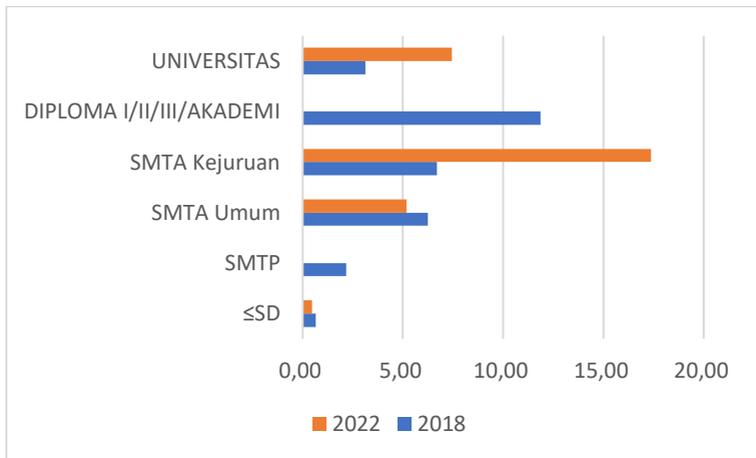
Gambar 3. 15. Perkembangan TPT Kabupaten Sorong Berdasarkan Golongan Umur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS 2022

Selanjutnya, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan kebalikan dari TPT, di mana TKK adalah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. TKK mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi TKK, artinya kesempatan kerja juga semakin tinggi. Diketahui bahwa TKK Kabupaten Sorong pada periode 2022 terbilang cukup tinggi, yakni 96,62 persen.

Lebih lanjut, untuk TPT di Kabupaten Sorong yang dengan angka tertinggi adalah SMTA Kejuruan dengan

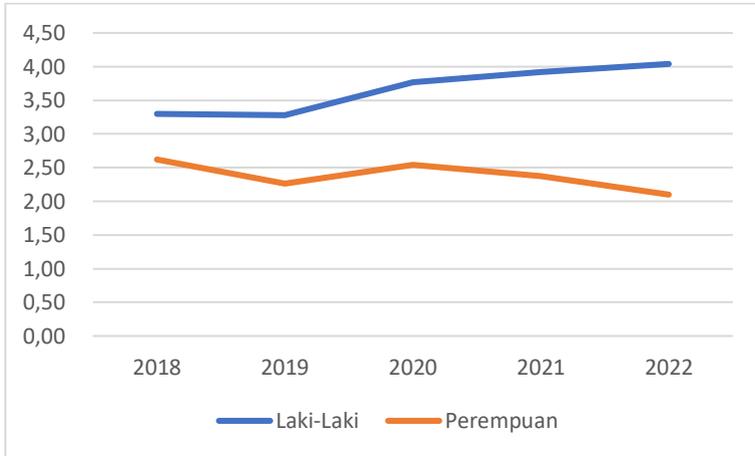
angka 17,38 persen. Kenaikan pada level pendidikan ini terbilang cukup signifikan jika dibanding 2018. Sementara itu, untuk golongan Diploma I/II/III Akademi tidak ada yang menganggur.



Gambar 3. 16. Perkembangan TPT Kabupaten Sorong Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS 2022

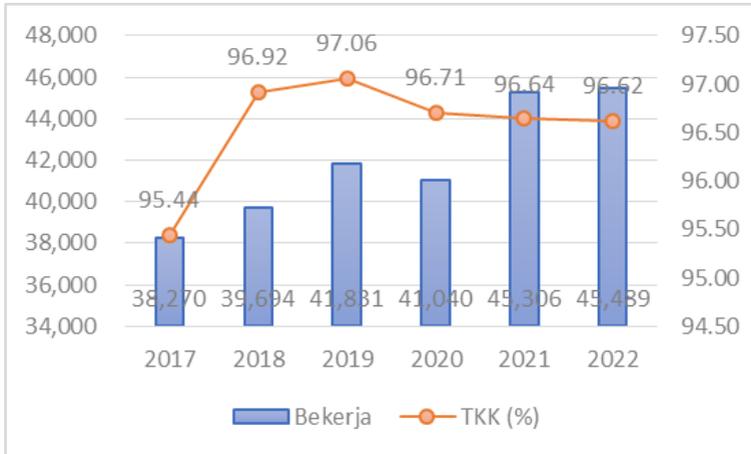
Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, TPT di Kabupaten Sorong didominasi oleh laki-laki dengan angka 4,04 dan perempuan 2,1 di tahun 2022. Namun demikian, angka pada dua jenis kelamin ini terbilang kecil karena masih di bawah 5 persen. Tren untuk perempuan menurun dari 2020 hingga 2022.



Gambar 3. 17. Perkembangan TPT Kabupaten Sorong Berdasarkan Jenis Kelamin 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS 2022

Senada dengan TPT, perkembangan TKK di Kabupaten Sorong dalam enam tahun terakhir juga berfluktuasi. Tahun 2019, di mana TPT sedang berada di posisi terendah, TKK tercatat berada di puncak tertingginya yaitu 97,06 persen. Selanjutnya, seiring dengan pandemi TKK terlihat menurun dari tahun 2020 hingga 2022 sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.



**Gambar 3. 18. Perkembangan Jumlah Orang Bekerja dan
TKK Kabupaten Sorong 2017-2022**

Sumber: Sakernas, BPS (2022)

Ketersediaan Tenaga Kerja Di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Ketersediaan tenaga kerja yang dapat mensupport KEK Sorong dapat terlihat dari jumlah serta profil lulusan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi seperti universitas atau politeknik serta pendidikan menengah formal seperti sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Selain melalui pendidikan formal juga dapat didukung oleh lulusan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal

seperti lembaga pelatihan, lembaga kursus, dan lain-lain milik Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta.

Lulusan Lembaga Pendidikan Formal

Ketersediaan tenaga kerja yang berasal lulusan lembaga pendidikan formal tentunya sangat dipengaruhi dari jumlah sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sorong. Berdasarkan data dari Kemendikbud RI, lembaga pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Sorong terdiri atas 19 Sekolah Menengah Atas (SMA), 8 Madrasah Aliyah (MA), dan 7 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Sorong terdapat 3 sekolah tinggi yang terdiri dari 2 sekolah tinggi di bidang keagamaan dan 1 sekolah tinggi dibidang keguruan dan ilmu pendidikan.

**Tabel 3. 1. Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik SMK
Menurut Jurusan di Kabupaten Sorong**

Nama SMK	Jurusan		Jumlah Peserta Didik 2023
SMK MUHAMMADIYAH SALAWATI KABUPATEN SORONG	1	Teknik Otomotif	15
	2	Teknik Komputer dan Informatika	16

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di
Kawasan Ekonomi Sorong

Nama SMK	Jurusan		Jumlah Peserta Didik 2023
SMK NEGERI 2 KABUPATEN SORONG	1	Teknik Otomotif	24
	2	Teknik Komputer dan Informatika	12
SMK MUHAMMADIYAH AIMAS KABUPATEN SORONG	1	Teknik Komputer dan Informatika	38
	2	Akuntansi dan Keuangan	11
SMK NEGERI 1 KABUPATEN SORONG	1	Teknik Ketenagalistrikan	27
	2	Teknik Otomotif	70
	3	Teknologi Konstruksi dan Properti	27
	4	Teknik Komputer dan Informatika	59
	5	Manajemen Perkantoran	59

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di
Kawasan Ekonomi Sorong

Nama SMK	Jurusan		Jumlah Peserta Didik 2023
	6	Akuntansi dan Keuangan	61
SMK YPK PENGHARAPAN KABUPATEN SORONG	1	Teknik Komputer dan Informatika	20
	2	Agribisnis Tanaman	16
	3	Agribisnis Ternak	7
	4	Akuntansi dan Keuangan	24
SMKS KESEHATAN PELITA SORONG	1	Keperawatan	32
	2	Farmasi	11
SMKS MODELINK MUBARAKAH KABUPATEN SORONG	1	Teknik Otomotif	70
	2	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	35
	3	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	10

Sumber: Kemendikbud RI

Data dari yang diambil dari Kemendikbud RI, jumlah siswa SMK tahun 2023 yang ada di Kabupaten Sorong berjumlah 644 siswa SMK dalam satu tahun ajaran. Secara jenis keahlian, siswa SMK di Kabupaten Sorong didominasi berasal dari jurusan teknik otomotif dengan jumlah siswa 179 orang, lalu teknik komputer dan informatika dengan jumlah siswa 145 orang, selanjutnya jurusan akuntansi dan keuangan sebanyak 96 siswa. Beberapa jurusan lainnya yang tersedia pada SMK-SMK yang ada di Kabupaten Sorong diantaranya Manajemen Perkantoran, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, Keperawatan, Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Ketenagalistrikan, Agribisnis Tanaman, Farmasi, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Agribisnis Ternak.

Lulusan Lembaga Pelatihan

Tidak hanya dari Lembaga pendidikan formal ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas juga dapat berasal dari lembaga non formal melalui pelatihan-pelatihan vokasional yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Sorong. Pelatihan peningkatan kompetensi saat ini dilakukan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang berada di Kota Sorong. Beberapa jenis kejuruan yang dilakukan pelatihan di BPVP Sorong diantaranya: Teknik Listrik/Instalasi Penerangan (16 Orang), Teknik Otomotif/Teknik Sepeda Motor (48

Orang), Garmen Apparel/Menjahit (48 Orang), Teknik Otomotif/Motor Tempel (32 Orang), Bangunan/Furniture Assembling (16 Orang), Teknik Las Industri/Las Industri 3F (16 Orang), Processing/Pengolahan Hasil Pertanian (112 Orang), Tata Rias Kecantikan (32 Orang), Refrigeration/Teknik Tata Udara (16 Orang).

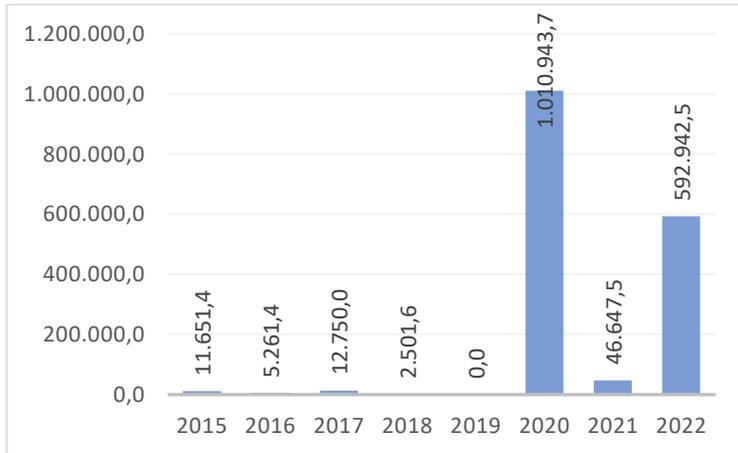
3.3 Investasi di Kabupaten Sorong

Penanaman modal di Kabupaten Sorong masih terbilang minim, dan ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk mempromosikan daerah ini agar Kabupaten Sorong dapat menjadi tujuan investasi yang atraktif bagi penanam modal. Kehadiran KEK Sorong diharapkan menjadi salah satu stimulus yang dapat menarik investor. Secara umum, profil investasi baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Sorong dideskripsikan di bawah ini.

3.3.1 PMDN

Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sorong tercatat masih cukup minim, terutama di tahun 2019 ke belakang. Realisasi PMDN Kabupaten Sorong di tahun 2020 menjadi yang tertinggi di delapan tahun terakhir, yakni mencapai Rp1.010.943,7 juta.

Sementara itu, data terakhir menunjukkan PMDN pada 2022 terealisasi sebesar Rp592.942,5 juta.

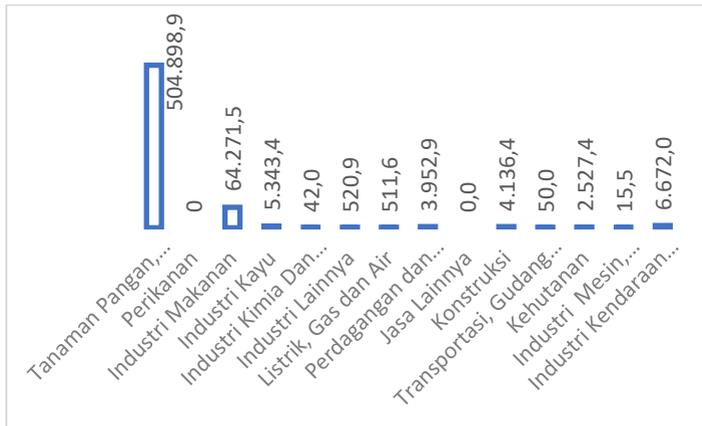


**Gambar 3. 19. Realisasi PMDN di Kabupaten Sorong
2015-2022 (dalam juta Rupiah)**

Sumber: NSWI, 2023

Ditinjau berdasarkan sektornya, PMDN 2022 di Kabupaten Sorong dengan nilai investasi tertinggi berada di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Nilai investasi sektor ini mencapai Rp504.898,9 juta atau 85 persen dari total realisasi PMDN tahun 2022. Kekayaan alam di Kabupten Sorong menyimpan potensi tinggi pada komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

Sehingga hal ini menjadikan sektor tersebut cukup atraktif bagi investor.



Gambar 3. 20. PMDN Per Sektor di Kabupaten Sorong 2022 (dalam juta Rupiah)
PMDN Per Sektor di Kabupaten Sorong 2022 (dalam juta Rupiah)

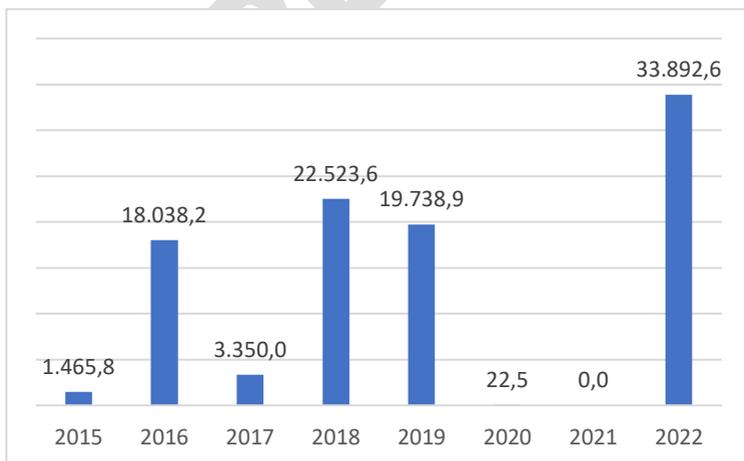
Sumber: NSWI, 2023

Industri makanan menjadi sektor dengan realisasi PMDN terbesar kedua di Kabupaten Sorong. Pada periode yang sama, nilai investasi di sektor ini tercapai sebesar Rp64.271,5 juta. Selanjutnya, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi, industri kayu, dan konstruksi menempati ranking selanjutnya dengan nilai investasi masing-masing sebesar Rp6.672 juta, Rp5.343,4 juta, dan Rp4.136,4 juta secara berturut-turut. Sementara itu, nilai investasi dalam negeri terkecil ada pada sektor perikanan,

jasa lainnya, dan industri mesin, elektronik, alat kedokteran, dan peralatan yang mana nilainya berkisar Rp0 hingga Rp15,5 juta.

3.3.2 PMA

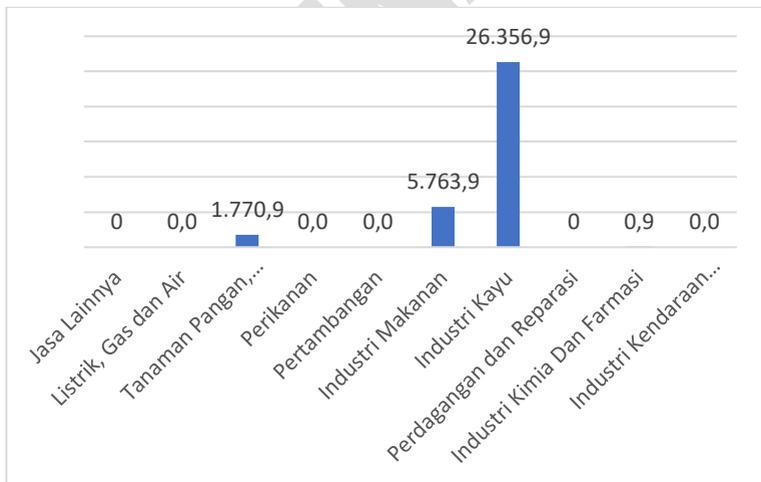
Perkembangan realisasi PMA di Kabupaten Sorong dalam delapan tahun terakhir terbilang fluktuatif. Tercatat, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai investasi mencapai USD33.892,6 ribu. Realisasi tertinggi kedua ada pada tahun 2018 yang tercapai dengan nilai sebesar USD22.523,6 ribu. Sementara itu, tahun 2020 dan 2021 di mana pandemi sedang berada di titik kritisnya, disaat yang bersamaan juga menjadi tahun dengan realisasi PMA terendah, yakni USD22,5 ribu dan USD 0 secara berturut-turut.



Sumber:

Gambar 3. 21. Realisasi PMA di Kabupaten Sorong 2015-2022 (dalam ribu USD)

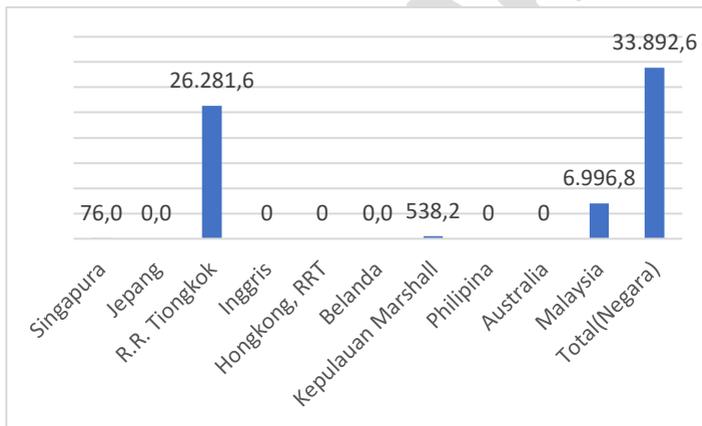
Pada periode 2022, industri kayu menjadi sektor dengan nilai PMA tertinggi, yakni mencapai USD26.356,9 atau 78 persen dari total investasi di 2022. Selanjutnya, diikuti oleh sektor tanaman pangan dan industri makanan dengan nilai investasi masing-masing sebesar USD1.770,9 ribu dan USD5.763,9 ribu. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa PMA di Kabupaten Sorong tahun 2022 masih terbilang minim.



Gambar 3. 22. PMA Per Sektor di Kabupaten Sorong 2022 (dalam ribu USD)

Sumber: NSWI, 2023

Ditinjau dari asal negaranya, investasi asing terbanyak berasal dari Tiongkok dengan nilai sebesar USD26.281,6 ribu atau 77,5 persen dari total PMA 2022. PMA dari Malaysia menempati urutan selanjutnya dengan nilai investasi sebesar USD6.996,8 ribu. Ditinjau dari total proyeknya, PMA di Kabupaten Sorong di tahun 2022 terdiri dari 24 proyek. Singapura menjadi negara dengan proyek investasi terbanyak, yakni 18 proyek namun nilai investasinya relatif kecil (USD76 ribu).



Gambar 3. 23. PMA di Kabupaten Sorong Berdasarkan Asal Negeranya 2022 (dalam ribu USD)

Sumber: NSWI, 2023

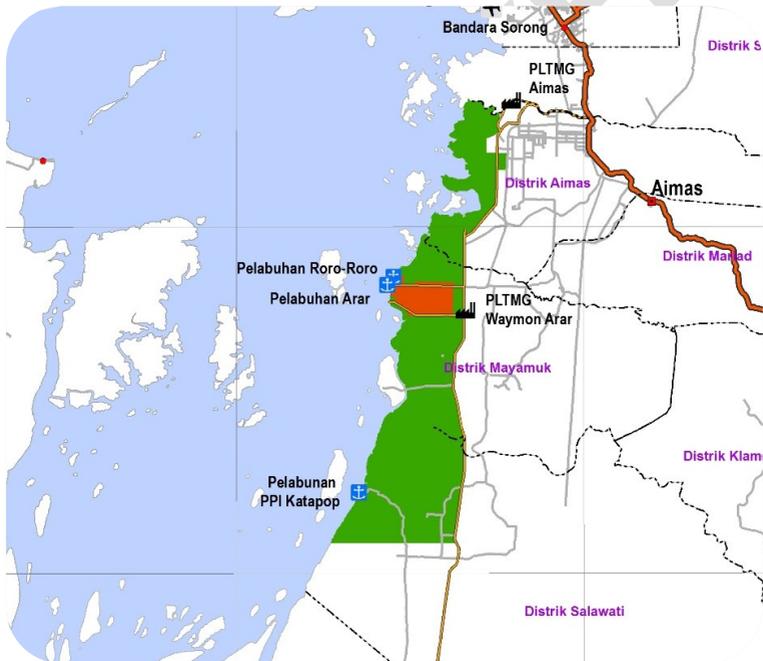
BAB 4. PROFIL KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG

4.1. Gambaran Umum KEK

KEK Sorong diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong untuk membuat pusat pertumbuhan ekonomi baru. Satu-satunya KEK di pulau Papua ini berlokasi Kabupaten Sorong. Lokasi KEK Sorong berada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Areal ini dibangun di atas lahan seluas 523,7 Ha. Secara geografis, KEK Sorong berada di jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia. Di saat yang bersamaan, KEK Sorong juga terletak di Selat Sele, sehingga memiliki keunggulan geoekonomi berupa potensi tinggi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi ini juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agro industri, serta pertambangan.

Ditinjau dari dasar hukumnya, KEK Sorong diatur berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan PP Nomor 31 tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. Kegiatan utama KEK Sorong meliputi industri pengolahan nikel, industri pengolahan kelapa sawit, industri hasil hutan dan perkebunan (sagu), serta logistik. KEK Sorong didukung

infrastruktur kawasan seperti pembangkit listrik PLN 50 MW, Kantor Administrator kawasan, pelabuhan Arar, jaringan air bersih 5 liter/detik. Selain itu, infrastruktur didukung oleh pelabuhan Sorong, PLTMG Arar, PLMTG Waymon, Bandara Domine Eduard Osok, Pelabuhan Oro-Oro Arar dan pelabuhan Arar.



Gambar 4. 1. Peta KEK Sorong

Sumber: Administrator KEK Sorong

Untuk tenant eksisting saat ini ada PT Malamoi Olom Wobok (MOW) selaku BUPP, Semen Indonesia, Aspalth Curah, CPO, Pertadata Gas, dan PT Perahu Katamarang Papua. Dari enam perusahaan eksisting ini memiliki total tenaga kerja sebanyak 104 orang. PT Semen Indonesia di KEK Sorong ini diperuntukkan untuk pengemasan dan perusahaan CPO diperuntukkan untuk pengemasan.

4.2. Realisasi dan Rencana Investasi di KEK

Berdasarkan data dari laporan Dewan Nasional KEK tahun 2021, tercatat jumlah realisasi yang ada di KEK Sorong sejak di ditetapkan menjadi KEK pada tanggal 1 Agustus 2016 hingga akhir tahun 2021 sebesar Rp204,76 Miliar, lalu pada tahun 2022 terjadi peningkatan investasi sebesar Rp44,2 Miliar sehingga menjadi realisasi Rp254 Miliar. Jumlah tenant yang ada di KEK Sorong hingga tahun 2022 berjumlah 8 pelaku usaha, yaitu: 1. PT Malamoi Olom Wobok 2. PT Pelabuhan Indonesia 3. PT Semen Indonesia 4. PT Bumi Sarana Utama 5. PT Henrison Inti Persada 6. PT Pertadaya Gas 7. PT Perahu Catamaran Papua 8. PT Satu Suku Pertanian.

Terdapat 4 pelaku usaha ekisting yang telah ada sebelum ditetapkan menjadi KEK Sorong. Yang terbesar adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang pengemasan semen yang telah berinvestasi sebesar

Rp159,9 miliar. Selanjutnya ada PT Henrison Inti Persada Perusahaan ini sudah mengirimkan CPO sebesar 500 – 2000 mT yang mereka punya melalui kapal yang bersandar di Pelabuhan Arar. PT Henrison Inti Persada juga sudah menikmati kemudahan akses yang disediakan kawasan melalui Pelabuhan Arar. Selanjutnya, ada beberapa pelaku usaha baru yang telah beroperasi dan dalam tahap pembangunan adalah PT Perahu Catamaran Papua dari Belanda, dan PT Satu Suku Pertanian dari Amerika Serikat.

Salah satu pelaku usaha yang direncanakan segera bergabung di KEK Sorong dan saat ini telah melaksanakan survei awal topografi dan penyelidikan tanah adalah PT Sorong Ignite Ecopark, sebuah PMDN yang memiliki rencana bisnis industri nikel kadar rendah untuk baterai dan produk turunan limbah buangan, dengan rencana nilai investasi sebesar Rp20,5 triliun. Untuk di Tahun 2023 KEK Sorong memiliki rencana bisnis dengan mengembangkan Sorong Ignite Ecopark (Nickel Processing Eco Industrial Park) oleh PT Trinitan Green Energy Metals dengan rencana investasi sebesar Rp9,8 triliun.

4.3. Realisasi dan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja KEK

Berdasarkan data yang diperoleh dari BUPP KEK Sorong, tercatat jumlah realisasi tenaga kerja yang terserap di KEK Sorong berjumlah 100 orang yang tersebar kebeberapa perusahaan, yaitu: di PT Malamoi Olom

Wobok ada 13 orang (10 operator 3 orang security), PT Pelindo terdapat 3 orang, PT Semen Indonesia menyerap 40 orang untuk bagian pengemasan, PT Bumi Sarana Utama yang bergerak dibidang asphalt curah sebanyak 25 orang, PT Henrison Inti Persada yang bergerak dibidang penampungan CPO sebanyak 6 orang, PT Pertadaya Gas sebanyak 6 orang untuk mengisi bagian operator gas maintenance. PT Perahu Katamaran Papua sebanyak 14 orang untuk tenaga kontruksi, PT Inti Kebun Sejahtera yang luas lahannya lahannya paling luas sebesar 10 Ha namun hingga saat ini masih belum ada kegiatan.

Rencana tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PT Trinitan Green Energy Metals dalam pembangunan Sorong Ignite Ecopark sebanyak 4.250 orang pada tahun 2026. Untuk rencana serapan tenaga kerja di tahun 2024 sebanyak 2.100 orang, lalu meningkat menjadi 2.900 orang di tahun 2025, dan mencapai kondisi ultimatenya di tahun 2026 dengan serapan 4.250 orang.

BAB 5. DAMPAK PEMBANGUNAN DAN PROYEKSI KESEMPATAN KERJA DI KEK SORONG

Ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di kawasan ekonomi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi bagi peningkatan daya saing kawasan industri tersebut (Zakir, 2003). Sebab tingginya daya saing dan daya tarik kawasan industri salah satunya ditopang oleh aspek ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Pembangunan KEK Sorong perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di kawasan baik selama pembangunan maupun setelah beroperasi.

5.1. Dampak KEK Sorong terhadap Perekonomian dan Perluasan Kesempatan Kerja

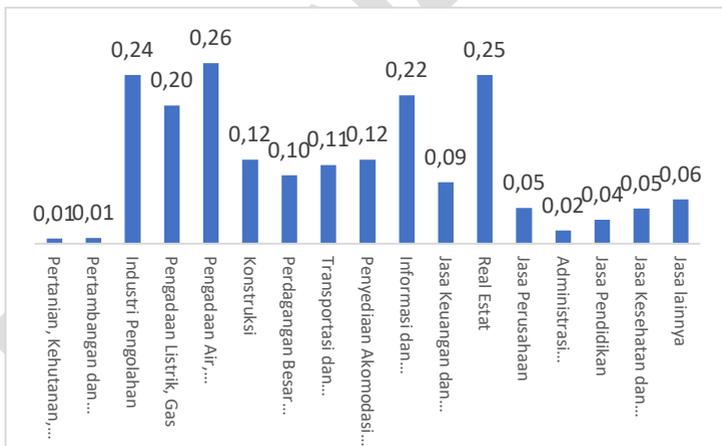
Pembangunan KEK Sorong diprediksi akan memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor di luar kegiatan utama di kawasan tersebut. Analisis

dampak pembangunan KEK Sorong disusun dengan metode *Computable General Equilibrium* (CGE) dengan pendekatan regional. Model ekonomi ini diarahkan untuk melihat dampak perubahan variabel ekonomi secara umum terhadap perekonomian wilayah seperti pertumbuhan sektoral dan distribusi penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor dan pendapatan pada berbagai bentuk rumah tangga, sektor industri dan beberapa indikator ekonomi makro. Besaran shock (simulasi) dilakukan terhadap perkembangan peningkatan investasi pada KEK Sorong dikaitkan terhadap investasi pada propinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan hasil kalkulasi maka besaran simulasi investasi pada KEK Sorong adalah sebesar 0,215 persen. Masih rendahnya simulasi (*shock*) yang diberikan dikarenakan realisasi investasi di KEK Sorong ini masih tergolong kecil.

Pembahasan mengenai dampak pembangunan KEK dalam dokumen ini akan difokuskan terhadap pertumbuhan output ekonomi sektoral dan perubahan kesempatan kerja (penyerapan tenaga kerja). Berdasarkan hasil analisis CGE, ketika terjadi pembangunan KEK (yang diasumsikan dengan tingkat investasi), maka akan memberikan dampak terhadap tumbuhnya ekonomi di berbagai sektor, tidak hanya

pada sektor yang terkait dengan kegiatan utama di KEK, namun juga pada sektor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis CGE, sektor ekonomi yang akan terdampak tumbuh paling tinggi karena adanya pembangunan KEK Sorong adalah sektor pengelolaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang yaitu sebesar 0,26 persen. Selanjutnya, sektor yang akan tumbuh diikuti oleh industri pengolahan sebesar 0,24 persen dan real estate sebesar 0,25 persen. Selain itu, sektor-sektor lainnya juga akan mengalami peningkatan.

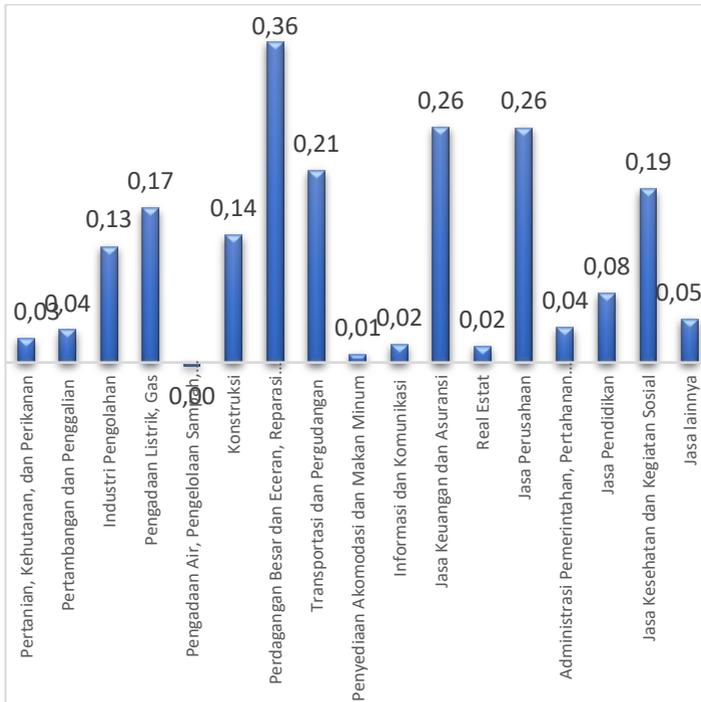


Gambar 5. 1. Dampak Pembangunan KEK Sorong terhadap Perubahan Output Sektoral

Sumber: Hasil Perhitungan INDEF (2023)

Lebih lanjut, pembangunan KEK Sorong juga akan memiliki dampak terhadap kesempatan kerja berdasarkan sektor. Seiring meningkatnya peningkatan output, maka serapan tenaga kerja juga akan sejalan dengan peningkatan tersebut.

Berdasarkan Gambar 5.2, dampak yang dihasilkan KEK Sorong terhadap perubahan kesempatan kerja sektoral tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan, sampai dengan saat ini, investasi yang ada di KEK Sorong tergolong minim. Sektor yang memiliki dampak terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan sepeda motor sebesar 0,36 persen. Selanjutnya, sektor jasa keuangan dan asuransi dan jasa perusahaan menjadi terbesar kedua dengan persentase yang sama 0,26 persen. Selanjutnya adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Jika ditinjau dari kegiatan utama di KEK Sorong maka berorientasi terhadap industri pengolahan. Namun dikarenakan realisasi investasi yang ada saat ini masih relatif kecil maka dampak yang diberikan juga belum optimal. Hal ini terlihat dari kecilnya tambahan output sektoral pada Gambar 5.1.



Gambar 5. 2. Dampak Pembangunan KEK Sorong Terhadap Perubahan Kesempatan Kerja Sektoral

Sumber: Hasil Kalkulasi Model CGE IndoTERM

5.2. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di KEK Sorong

Dalam melakukan proyeksi tenaga kerja perlu didahului dengan melakukan proyeksi investasi di setiap KEK. Hal ini disebabkan karena investasi merupakan salah satu determinan penyerapan tenaga

kerja. Proyeksi investasi menggunakan 2 scenario, yakni moderat (*low*) dan optimis (*high*). Skenario didasari pada asumsi realisasi investasi selama 5 tahun ke depan. Penentuan besaran asumsi (moderat & optimis) didasari pada capaian realisasi dan pertumbuhan investasi di masing-masing KEK. Karena capaian dan pertumbuhan investasi di setiap KEK berbeda maka penentuan besaran asumsi pada 5 tahun mendatang (2028) juga berbeda.

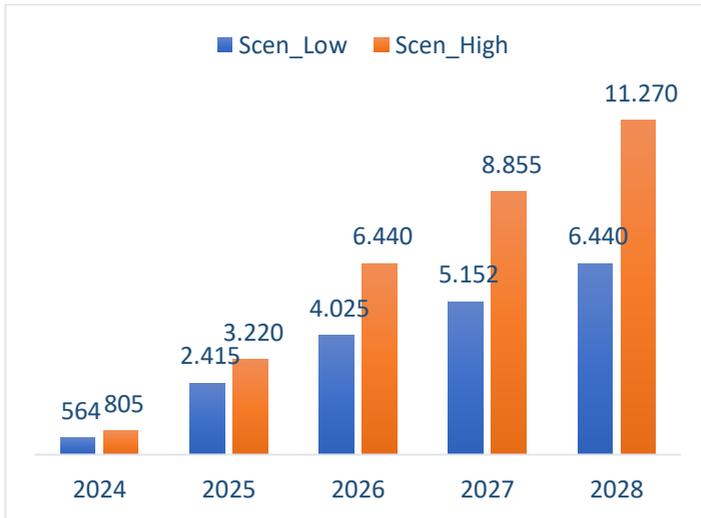
Untuk memproyeksi tenaga kerja, terlebih dahulu diestimasi elastisitas pertumbuhan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan rasio antara penyerapan tenaga kerja terhadap nilai investasi. Setiap KEK memiliki rasio yang berbeda. Nilai investasi pada per tenaga kerja untuk KEK Sorong adalah Rp0,2 miliar maka akan menyerap 1 orang tenaga kerja. Rasio ini selanjutnya akan digunakan sebagai basis rasio untuk melakukan proyeksi tenaga kerja.

Tabel 5. 1. Skenario Proyeksi Investasi pada KEK

Kawasan Ekonomi Khusus	Realisasi Investasi (Tw 3 2023)		
		<i>Moderat</i>	<i>Optimis</i>
KEK Sorong	0.79%	20%	35%

Sumber: Dewan Nasional KEK, diolah (2023).

Berdasarkan capaian kinerja investasi di KEK Sorong dan asumsi skenario realisasi investasi di Tabel 5.1, maka diperoleh hasil proyeksi investasi di KEK Sorong seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.3. berdasarkan hasil proyeksi, pada asumsi moderat (low scenario) pada 2024 nilai investasi di KEK Sorong diperkirakan akan mencapai Rp564 miliar. Nilai ini meningkat dari triwulan III 2023 hingga di tahun 2028 menjadi Rp6.440 miliar. Proyeksi nilai investasi selanjutnya akan dijadikan dasar basis untuk proyeksi permintaan tenaga kerja dengan menggunakan nilai rasio nilai investasi per tenaga kerja di KEK Sorong.



Gambar 5. 3. Proyeksi Investasi KEK Sorong

Sumber: Dewan Nasional KEK, diolah INDEF (2023)

Berdasarkan hasil proyeksi permintaan tenaga kerja 2024 sampai dengan 2028, maka permintaan tenaga kerja diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Secara detail, hasil proyeksi permintaan tenaga kerja ditampilkan pada gambar di bawah ini. Pada tahun 2024 diperkirakan permintaan tenaga kerja KEK Sorong akan mencapai 236 tenaga kerja pada skenario rendah dan 337 tenaga kerja untuk skenario tinggi. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan hasil proyeksi investasi yang terus

meningkat. Pada 2028 diperkirakan permintaan tenaga kerja akan menjadi sebanyak 2.696 orang pada skenario rendah dan sebanyak 4.718 pada skenario tinggi.

Dari hasil proyeksi permintaan tenaga kerja agregat KEK Sorong tersebut, maka selanjutnya akan diproyeksi sebaran (struktur) permintaan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan. Kedua indikator ini mengacu pada klasifikasi tabel Sakernas.



**Gambar 5. 4. Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di
KEK Sorong**

Sumber: Dewan Nasional KEK, diolah (2023)

Berdasarkan hasil proyeksi permintaan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di KEK Sorong, maka terlihat bahwa permintaan terbanyak diperkirakan akan terjadi pada tenaga kerja lulusan diploma, SMTA kejuruan, dan universitas. Berdasarkan proyeksi dengan asumsi moderat (skenario rendah), pada tahun 2024 permintaan tenaga kerja untuk lulusan diploma diperkirakan sebanyak 71 orang. Di sisi lain permintaan tenaga kerja lulusan SMTA kejuruan akan menjadi sebanyak 54 orang dan lulusan universitas sebanyak 47 orang.

Jumlah permintaan tenaga kerja tersebut diperkirakan terus meningkat hingga pada tahun 2028, dimana lulusan SMTA kejuruan diprediksi akan mencapai 620 orang. Sementara permintaan lulusan diploma diperkirakan akan mencapai sebesar 809 orang dan lulusan universitas sebanyak 539 orang.

Jika dilihat struktur tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan maka KEK Sorong akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Sementara permintaan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah (SMTP ke bawah) di KEK Sorong hanya mencapai 12,2 persen. Karakteristik ini jelas berbeda dengan struktur penduduk yang bekerja di

Kabupaten Sorong, dimana 59,5 persen penduduk yang berkerja adalah tamatan SMTP ke bawah.

Tabel 5. 2. Skenario Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di KEK Sorong (Asumsi Moderat)

Tahun	Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di KEK Sorong						
	SD dan SD ke Bawah	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	DIPLOMA	UNIVERSITAS	JUMLAH
2024	12	17	35	54	71	47	236
2025	51	71	152	233	303	202	1,011
2026	84	118	253	388	505	337	1,685
2027	108	151	324	496	647	431	2,157
2028	135	189	404	620	809	539	2,696

Sumber: Dewan Nasional KEK, diolah (2023)

Selanjutnya, dokumen ini juga menyajikan analisis proyeksi permintaan tenaga kerja di KEK Sorong berdasarkan jabatan. Berdasarkan Tabel 5.3., jelas bahwa jabatan tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan adalah Pekerja Pengolahan, Kerajinan dan ybdi. Selain itu, teknisi dan asisten profesional juga diperkirakan akan mengalami banyak permintaan di

KEK Sorong. Untuk lebih detilnya. Proyeksi permintaan tenaga kerja berdasarkan tenaga kerja berdasarkan jabatan akan ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 5. 3. Tabel Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di
KEK Sorong Berdasarkan Jabatan**

Tahun	Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di KEK Sorong									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JUMLAH
2024	5	9	50	13	31	7	53	40	28	236
2025	22	37	215	58	131	29	226	171	122	1,011
2026	37	62	358	96	218	49	376	286	204	1,685
2027	47	79	458	123	279	62	482	366	261	2,157
2028	59	99	573	154	349	78	602	457	326	2,696

1 Manajer; 2 Profesional; 3 Teknisi dan Asisten Profesional; 4 Tenaga Tata Usaha; 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan; 6 Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 7 Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan ybdi; 8 Operator dan Perakit Mesin; 9 Pekerja Kasar

Sumber: Sumber: Dewan Nasional KEK, diolah (2023)

5.3. Tantangan Pemenuhan Tenaga Kerja di KEK Sorong

Pemerintah KEK Sorong dan BUPP PT Malamoi Olom Wobok telah melakukan upaya besar dalam menghadapi permasalahan KEK. Upaya ini dilakukan

melalui pengadaan infrastruktur air sebesar 5 liter per detik, pengadaan listrik, dukungan penyediaan lahan, dan pendekatan ke stakeholder. Namun demikian, KEK Sorong masih memiliki tantangan untuk mewujudkan pemenuhan permintaan tenaga kerja. Tantangan tersebut mulai dari perbaikan kinerja investasi, penyiapan tenaga kerja dari sisi jumlah kuantitas hingga penyiapan kompetensi dan keahlian tenaga kerja agar sesuai dengan permintaan investor (tenant) di KEK Sorong. Beberapa tantangan dalam pemenuhan tenaga kerja di KEK Sorong diantaranya:

- 1. Investasi minim sehingga penyerapan tenaga kerja belum optimal.** Realisasi investasi KEK Sorong sampai saat ini baru mencapai 0,79 persen atau Rp254 miliar. Angka ini jauh dari target di awal Rp32.200 miliar. Lebih lanjut, tenant eksisting tidak menyerap banyak tenaga kerja. KEK Sorong memerlukan perusahaan besar sebagai perusahaan pioneer di KEK Sorong sehingga infrastruktur di KEK terbangun lebih masif. Salah satunya adalah sarana dan prasana seperti konektivitas ke lokasi.
- 2. Sarana peningkatan kompetensi dan pendidikan sesuai kegiatan utama KEK Sorong**

masih terbatas. Saat ini, pelatihan pemerintah melakukan pelatihan untuk menangkap peluang tenaga kerja melalui pelatihan yang bersifat umum, seperti pelatihan teknik listrik menjahit, pelatihan motor tempel, las, tata rias, las, meublair dan pelatihan pendingin. Pelatihan-pelatihan ini kecuali pelatihan las tidak memiliki koneksi langsung kompetensi yang dibutuhkan KEK sehingga masih menjadi tantangan terbesar dalam pemenuhan.

Terlebih lagi, tidak ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Papua Barat Daya sebagai provinsi baru. BLK terdekat ada di provinsi Papua Barat sehingga memerlukan kemitraan atau kerjasama dengan menyesuaikan kebutuhan kompetensi di KEK Sorong. Beberapa keahlian yang dibutuhkan adalah teknik mesin, teknik industri, keuangan, administrasi, medis, tenaga bongkar muat, kesehatan lingkungan, dan *security*. Kebutuhan tenaga kerja ini bisa didukung oleh lulusan SMK yang memiliki korelasi jurusan dengan keperluan ini.

Tantangan kompetensi ini juga berhubungan dengan daya saing tenaga kerja. Agar bisa

bersaing dengan pencari kerja yang berasal dari daerah lain, pemerintah dan BUPP memerlukan sertifikasi keahlian dan yang memenuhi Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

- 3. Infrastruktur untuk konektivitas KEK belum memadai.** Infrastruktur pendukung konektivitas di Sorong masih kurang memadai. Industri utama yang akan dibangun adalah logistik dan industri pengolahan baik hasil perkebunan dan penggalian, sehingga konektivitas menjadi vital. Selain itu, pelabuhan yang ada di KEK memiliki masalah alur kolam putar karena dangkal dan karang. Masalah ini memerlukan konsesi dengan perusahaan seperti Pelindo 4.
- 4. Ketersediaan tenaga kerja untuk kebutuhan industri utama KEK terbatas.** Siswa SMK di Kabupaten Sorong didominasi berasal dari jurusan teknik otomotif, teknik komputer dan informatika. Sementara jurusan yang banyak dibutuhkan adalah yang berkaitan dengan industri pengolahan nikel, pengolahan kelapa

sawit, hasil hutan dan perkebunan (sagu), serta logistik.

- 5. Kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan pemangku kepentingan perlu diperkuat.** Kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat vital dilakukan dalam hal kolaborasi BLK. DUDI dan institusi pendidikan perlu mendiskusikan kurikulum yang paling sesuai dengan KEK Sorong.

BAB VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh kesimpulan, diantaranya:

1. KEK Sorong memiliki kegiatan utama industri pengolahan nikel, industri pengolahan kelapa sawit, industri hasil hutan perkebunan (sagu) dan logistik. Saat ini ada 6 tenant eksisting yaitu PT Malamoi Olom Wobok sekaligus BUPP, PT Semen Indonesia, Aspalth Curah, CPO, Pertadaya Gas, dan PT Perahu Katamarang Papua.
2. Sejak ditetapkan sebagai KEK pada tahun 2016 dan mulai beroperasi di 2019, realisasi investasi yang terakumulasi hingga triwulan III 2023 baru mencapai Rp254 miliar atau 0,79 persen dari target pada 2035. Belum optimalnya realisasi investasi di KEK Sorong berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga triwulan III 2023, penyerapan tenaga kerja di KEK ini mencapai 100 orang atau sebesar 0,67 persen

dari target yang ditetapkan yakni sebanyak 15.024 orang.

3. Berdasarkan hasil analisis dampak pembangunan KEK Sorong dengan menggunakan model CGE, ketika terjadi pembangunan KEK (yang diasumsikan dengan tingkat investasi), maka akan memberikan dampak terhadap tumbuhnya ekonomi di berbagai sektor, tidak hanya pada sektor yang terkait dengan kegiatan utama di KEK, namun juga pada sektor lainnya. Sektor ekonomi lainnya yang akan terdampak tumbuh paling tinggi karena adanya pembangunan KEK Sorong adalah sektor pengelolaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang yaitu sebesar 0,26 persen, diikuti oleh sektor yang akan tumbuh diikuti oleh industri pengolahan sebesar 0,24 persen serta real estate sebesar 0,25 persen.
4. Pembangunan KEK Sorong akan memberikan dampak pada kesempatan kerja berdasarkan sektor. Dengan meningkatnya pertumbuhan output maka serapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Dampak paling tinggi terhadap kesempatan kerja ada pada sektor jasa

keuangan dan asuransi diikuti jasa perusahaan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

5. Berdasarkan hasil proyeksi permintaan tenaga kerja di KEK Sorong pada 2024 sampai 2028, permintaan tenaga kerja diproyeksi akan terus mengalami peningkatan. Pada 2024, permintaan tenaga kerja mencapai 236 orang untuk skenario rendah dan 337 untuk skenario tinggi. Di tahun 2028, permintaan tenaga kerja diproyeksi sebesar 2.696 untuk skenario rendah dan 4718 untuk skenario tinggi.
6. Berdasarkan hasil proyeksi, pada asumsi moderat (low scenario) pada 2024 nilai investasi di KEK Sorong diperkirakan akan mencapai Rp564 miliar. Nilai ini meningkat dari triwulan III 2023 hingga di tahun 2028 menjadi Rp6.440 miliar.
7. Hasil proyeksi permintaan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan terlihat bahwa permintaan terbanyak diperkirakan akan terjadi pada tenaga kerja lulusan diploma, SMTA kejuruan dan universitas. Di 2024, proyeksi permintaan tenaga kerja lulusan Diploma 71 orang, SMTA Kejuruan 54 orang,

dan 47 orang universitas. Di 2028 proyeksi permintaan diploma 809 orang, SMTA Kejuruan 620 orang, dan universitas 539 orang.

8. Struktur tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan maka KEK Sorong akan lebih mempekerjakan tenaga kerja tingkat menengah dan pendidikan tinggi. Sementara permintaan tenaga kerja SMP ke bawah (SMTP ke bawah) di KEK Sorong kecil. Ini menunjukkan bahwa sebuah Kawasan Ekonomi Khusus memiliki karakteristik dimana pendidikan menengah dan tinggi relatif lebih banyak diperlukan.
9. Hasil proyeksi permintaan tenaga kerja di KEK Sorong berdasarkan jabatan yang paling dibutuhkan adalah adalah pekerja pengolahan, kerajinan dan ybdi, teknisi dan asisten profesional, dan operator dan perakitan mesin.

6.2. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan dalam dokumen ini, diantaranya:

1. Melakukan percepatan sosialisasi konsep dan perencanaan di level pusat, provinsi, kabupaten

dan pelaksana teknis. Hal ini dilakukan agar OPD dan SKPD mampu merespon sesuai dengan keperluan KEK Sorong. Terutama pelatihan yang memiliki vokasi terbatas.

2. Mendorong peningkatan infrastruktur pendukung konektivitas KEK di darat dan laut, salah satunya perluasan akses jalan menuju KEK.
3. Mengembangkan kurikulum pelatihan yang link and match yang harmonis keperluan investor dan calon investor KEK.
4. Mengembangkan SKKNI sesuai dengan kebutuhan target investasi dan ketenagakerjaan KEK Sorong 2024-2028.
5. Mempersiapkan dan mengusulkan BLK untuk Provinsi Papua Barat Daya yang langsung menysar kebutuhan prioritas KEK Sorong.
6. Mengadakan pelatihan bagi Angkatan Kerja untuk kompetensi yang sesuai dengan sektor prioritas.
7. Mendorong kemitraan dan kolaborasi antara dunia usaha, dunia industri dan pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, Aradhna - ADB. (2022). *Special Economic Zones in The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*. Philippines: Asian Development Bank.
- BPS. (2023). *Sakernas*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: bps.go.id
- BPK Republik Indonesia. (2023, 11 30). *Profil Entitas Kabupaten Sorong*. Retrieved from [bpk.go.id: https://papuabarat.bpk.go.id/kabupaten-sorong/](https://papuabarat.bpk.go.id/kabupaten-sorong/)
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2022). *Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2021*. Jakarta: Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2023). *Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2022*. Jakarta: Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- (2016). *Peraturan Pemerintah Indonesia No. 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus*

UNCTAD. (2019). *World Investment Report 2019: Special Economic Zones*. New York: United Nations Publications.

(2020). *Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

(2009). *Undang Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus*.

PUSRENAKER

PUSRENAKER